

TABLOID Sinar Tani

P E R T A N I A N I N D O N E S I A B A R U

Edisi 17 - 23 Agustus 2022

No. 3955

Tahun LII



e-mail : sintani@cbn.net.id
redaksi@tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 087881605773
TERBIT SETIAP HARI RABU

Scan to visit our website :
www.tabloidsinartani.com

7 PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

11 Benih dan
Krisis Pangan

15 Gandeng
Penangkar
Sediakan Benih

Merdekakan Petani dari Musuh Tanaman



Dapatkan E-paper Tabloid Sinar Tani dengan mendownload aplikasi Sinar Tani - Wikitani  Info Berlangganan SMS/WA : 0813 1757 5066

ADVANTA

ADVANTA JAGUNG HEBAT

Penanganan Hama. Ini Upaya Petani, Pemerintah dan Komitmen CropCare

Pertanian tidak akan terlepas dari serangan hama sehingga akan selalu ada upaya penanganan dan pengendalian hama. Produk pertanian bukan hanya makanan manusia, banyak makhluk lain yang ikut menikmati karena itu makanannya juga. Tanpa upaya proteksi, kerusakan bisa mencapai 20-50 persen. Tidak salah jika tidak hanya petani yang berkepentingan mengamankan tanamannya dari serangan hama, tetapi juga melibatkan pemerintah dan para pengusaha bahan pemberantas hama.

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, yang dimakan hama adalah bagian dari amal kita. Prinsip penanganan hama juga selalu berdasarkan pada ambang batas kerusakan, tidak berarti pemusnahan hama secara total. Yang pasti ada upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian dan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang populasinya terus bertambah.

CropCare, satu Asosiasi Pengusaha Pupuk dan Pestisida mempunyai visi dan misi yang mulia, membantu petani dengan menyediakan kedua input yang penting tersebut dalam kuantitas yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Pemerintah memagari peredaran bahan kimia ini dengan berbagai aturan yang ketat sebelum pupuk dan bahan pemberantasan hama tersebut bisa beredar di pasar untuk melindungi petani dan produk pertanian dan lingkungan dari kerusakan.

Beralihnya penggunaan pupuk dan pemberantasan hama kepada bahan non kimia dilandasi kenyataan bahwa bahan kimia/anorganik berdampak buruk bagi kesehatan manusia, musuh alami dan lingkungan, serta tren permintaan terhadap bahan makanan yang tidak terkontaminasi residu bahan kimia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia merupakan upaya terakhir sesudah mengutamakan pencegahan dan penggunaan bahan pemberantas hama hayati dan organik.

Semua upaya petani, program pemerintah dan komitmen produsen pupuk dan pestisida ini terlihat sempurna. Ada hukum, undang-undang dan peraturan yang melandasinya, program pemerintah dan komitmen seluruh pengusaha untuk menangani hama secara komprehensif.

Di lapangan masih ada kerikil yang perlu disingkirkan seperti beredarnya pupuk dan pestisida palsu, dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan tanah dan musnahnya sumberdaya hayati. Terjadinya berbagai hal yang merugikan itu mengisyaratkan perlunya monitoring pengawasan yang ketat dan komitmen semua pihak.

Berita gembiranya, perkembangan penggunaan pupuk dan pemberantas hama organik dan hayati berdasarkan data Ditjen Tanaman Pangan sudah sangat menjanjikan. Penggunaan bahan organik juga sangat ditekankan dan bantuan khusus untuk pengembangan tanaman hortikultura diharuskan dalam bentuk bahan organik atau hayati.

Petani sendiri telah memproduksi pupuk dan bahan pemberantas hayati dalam jumlah cukup banyak dan diperjualbelikan. Tentu perlu mendapat dukungan agar penggunaannya lebih meluas. Sertifikasi, akreditasi dan standardisasi terus dikembangkan agar pemalsuan dapat ditekan sejauh mungkin. Ini semua tidak berarti menafikkan bahan pemberantas hama kimia, karena dalam situasi tertentu akan diperlukan.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: kedaulatanpangan.org

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Iqbal; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Ibnu Abas (Kaltara), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter:** Rori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Iqbal Husein, SE; Indri; Echa Sinaga, Dewi Ratnawati; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris Utama:** Soedjai Kartasasmita; **Komisaris:** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: sintani@cbn.net.id, redaksi@tabloidsinartani.com; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamitbda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 13.500 per edisi; **Tarif Iklan:** FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian RI

Masih Impor, Jangan bilang Merdeka

Merdeka !, Merdeka !, Merdeka !. Kita jangan bilang merdeka kalau kita masih tergantung impor. Kita harus pastikan bahwa semua arahan Presiden Jokowi untuk mengembalikan kejayaan pangan kita terlaksana dengan baik.

Kemerdekaan sesungguhnya baru bisa dipertahankan apabila bangsa Indonesia bebas dari ketergantungan impor. Indonesia dibawah pimpinan Jokowi sudah saatnya mengembalikan kejayaan pangan nasional.

Menekan ketergantungan impor harus bisa dibuktikan dengan peningkatan produksi tanaman pangan dan juga produksi panganan lokal. Terlebih saat ini, pemerintah secara serius tengah melakukan penanaman komoditas substitusi tepung terigu seperti sorgum sebagai pengganti gandum, juga meningkatkan penggunaan tepung dari singkong, sagu, jagung lokal dan lainnya.

Itulah kenapa kita tanam singkong, sagu dan sorgum. Semua agar kita merdeka dan bangga dengan buatan kita. Sagu, singkong dan sorgum itu kan kekuatan bangsa yang selama ini kita lupakan. Jadi harus kita kembalikan untuk kejayaan.

Pertanian adalah sektor strategis yang memberi keuntungan bagi semua orang. Pertanian memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana selama tiga tahun pandemi pertanian selalu tumbuh positif.

Kalian harus bangga sama pertanian. Kenapa? karena tiga tahun kita hadapi covid dan pertanian yang tumbuh positif. Ingat kalau ada tantangan kita harus siap memitigasi dan menghadapi. Intinya adalah doa tulus dan berjuang tekan impor.

Perlu diketahui, sektor pertanian memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2022 yang tumbuh 5,44 persen. Hal paling menarik, tiga sektor yang berkontribusi tertinggi, salah satunya adalah pertanian.

Ini terlihat dari besaran distribusi dan andil pertanian yang mencapai 12,98 persen atau tumbuh meyakinkan sebesar 1,37 persen. Tercatat faktor tumbuhnya Nilai Tukar Pertani (NTP) yang mencapai 3,20 persen berpengaruh terhadap pendapatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam melewati berbagai tantangan krisis global. Terlihat dari meningkatnya produksi pertanian selama tiga tahun terakhir. Kondisi itu bukan berarti aman mengingat covid dan perubahan cuaca masih terus berlangsung. Ditambah adanya perang dua negara eropa antara Rusia dan Ukraina.

Ancaman covid itu belum selesai dan membuat putaran ekonomi rendah. Semua yang tadinya berjalan rutin dan normatif dalam dua tahun ini berubah. Tapi ingat, pertanian tetap tumbuh dan tangguh.

Pertanian sejauh ini telah membuktikan sebagai bantalannya ekonomi negara. Produksi meningkat, ekspor melesat dan kesejahteraan petani naik tinggi. Saya berharap, semua pihak mampu menyerap setiap produksi yang dihasilkan didalam negeri.

Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Pertanian bisa melalui SMS ke: **087881605773** atau email ke: **sintani@cbn.net.id** atau **redaksi@tabloidsinartani.com** Jangan lupa sertakan nama dan alamat anda.



Ayo Manfaatkan Asuransi Pertanian

Asuransi Pertanian sangat penting bagi petani untuk melindungi usahatani. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin.

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 tahun 2013 pada Pasal 7 mengamanatkan pemberdayaan petani salah satunya melalui asuransi pertanian. Undang-undang ini diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 menguraikan tentang Asuransi Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan aturan tentang asuransi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Karenanya, Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (*risk management*) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti-rugi bagi petani yang terkena bencana. Semenjak fasilitas Asuransi Usahatani Padi (AOTP) ini diluncurkan dari tahun 2015, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian sampai dengan tahun 2021 realisasi luas lahan yang mengikuti asuransi

pertanian seluas 4.908.842,06 ha sedangkan luas lahan yang di klaim seluas 103.792,29 ha.

Adapun sasaran penyelenggaraan AOTP adalah: (a) Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT. (b) Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi.

Pada Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi Nomor: 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tertuang tugas dan tanggung jawab Petugas penyuluh pertanian adalah (a) Membantu tim teknis AOTP Kab/Kota melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dan pendaftaran peserta dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP); (b) Menumbuh kembangkan kelembagaan petani dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP).

Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)

Tugas dan tanggung jawab yaitu (a) Membantu tim teknis AOTP Kab/Kota melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dan pendaftaran peserta dalam pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) bersama Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), untuk mengetahui kepesertaan AOTP; (b) Melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan DPI (banjir, kekeringan, rob) dalam pengajuan proses klaim; (c) Melakukan bimbingan di kelompok tani.

Program AOTP dilaksanakan dalam koordinasi BPP/UPTD. Adapun kriteria peserta AOTP adalah Petani yang tergabung dalam kelompok tani, Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padipadalan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT), Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Saprasi, Saprodi, dan lain-lain).

Program AOTP dilaksanakan pada lahan beririgasi teknis, irigasi

setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana, lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik, lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah yang memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.

Dalam AOTP, harga pertanggung jawaban ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggung jawaban menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Adapun premi Asuransi Usahatani Padi senilai Rp 180.000,-/hektar/musim tanam. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau senilai Rp.144.000,-/hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp.36.000,-/hektar/musim tanam.

Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung jawaban dengan kondisi persyaratan.

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana berdasarkan formulir pendaftaran. Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AOTP akan diproses jika memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ayo Pelaku utama (petani) bersama dengan Penyuluh Pertanian sebagai pendamping di lapangan untuk terus memanfaatkan AOTP agar terhindar dari kerugian yang besar apabila terjadi kegagalan panen.

Penulis:
Wellyana
Sitanggang
Penyuluh
Pertanian Madya



Sampaikan Pendapat, Kritik, Saran dan Dukungan Anda tentang Pembangunan Pertanian melalui WA, SMS ke: 087881605773 atau email ke: sintani@cbn.net.id
Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda. SMS terpilih akan dimuat pada WA atau SMS Cangkul.



Gelar Buah Nusantara (GBN) adalah agenda tahunan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dalam rangka meningkatkan konsumsi buah masyarakat, mengembangkan agribisnis buah Nusantara serta kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI). Tahun ini adalah tahun ke 7 dan salah satu rangkaian kegiatannya adalah bazar buah di lokasi strategis seperti kantor pemerintahan, bandara, stasiun, rest area. Sebagai insan horti mari

berpartisipasi dengan menjadi peserta bazar buah Nusantara mikro. Dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Pastikan memiliki barang dagangan dan team anda
2. Pilih lokasi strategis seperti kantor pemerintahan, bandara, stasiun, kapal laut, rest area yang dipilih oleh team anda
3. isi formulir <https://form.jotform.com/222178538225054>
4. Konfirmasi ke admin wa
5. Bersedia bergabung ke wa group koordinasi

Terimakasih atas partisipasinya dalam meramaikan khasanah hortikultura Indonesia. **(KBHI)**

saya mau tanya apakah untuk membuat pestisida nabati, bisa kita buat dengan mencampur lebih dari 5-10 macam jenis tanaman yang bisa dibuat sebagai bahan dasar pembuatan pestisida nabati? Kedua yang ingin saya tanya apakah jenis bahan seperti limbah daun, umbi, buah dan limbah sayur yang sudah difermentasi dan berbentuk seperti pupuk cair

itu bisa diaplikasikan juga sebagai pestisida pada tanaman seperti disemprotkan ke seluruh tanaman? apakah bisa berdampak buruk pada tanaman tersebut? mohon tanggapannya.

(Ketut Sudarmini)

Maaf kita setuju menggunakan bahan organik di lapangan, tapi mohon dari pemangku kebijakan juga bisa mengurangi pemasok racun 2 (pestisida) berbahaya bagi kita semua.

(Puguh Margo Susilo)

Merdekakan Petani dari Musuh Tanaman



Hama dan penyakit tanaman menjadi musuh petani yang masih sulit dikalahkan. Berbagai cara kerap dilakukan petani, tapi hasilnya bisa dibilang belum memuaskan. Bahkan organisme pengganggu tanaman kerap datang saat musim tanam tiba.

Keluhan terhadap serangan hama penyakit tanaman hampir merata disuarakan petani di sentra pertanian Tanah Air. Datangnya organisme pengganggu tumbuhan seperti sudah menjadi tamu rutin petani.

Guna membantu petani dalam mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman, Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan CropCare menggelar webinar bertema Merdeka Petani dari Musuh Tanaman di Jakarta, Rabu (10/8).

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, M. Takdir Mulyadi mengatakan, pemerintah telah menargetkan produksi padi sebanyak 55 juta ton GKP (gabah kering panen) dengan luas pertanaman 11 juta ha. Begitu juga jagung target 36 juta ton pipilan kering dengan luas hamparan 4 juta ha.

Sedangkan untuk kedelai, pemerintah kini berupaya menghidupkan kembali. Tahun ini target pertanaman seluas 360 ribu ha dengan produksi minimal 1 juta ton. "Luas pertanaman inilah yang akan kita amankan dan lindungi dari potensi serangan OPT agar target bisa aman tercapai," katanya.

Dalam kebijakan perlindungan tanaman, Takdir menegaskan, pihaknya fokus pada PHT (Pengendalian Hama Tanaman) dengan teknologi pengendalian

ramah lingkungan. Jadi pemerintah menekankan penggunaan bahan dan teknologi yang tidak merusak lingkungan dan ekosistem sawah. "Ini yang kami terus jaga," tegasnya.

Namun dengan keterbatasan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Takdir mengatakan, pihaknya memberdayakan petani menyiapkan bahan pengendali yang ramah lingkungan, termasuk isolat agens pengendali hayati (APH) dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar petani.

"Ini yang kita terus dorong ke depannya agar petani bisa memproduksi pengendali OPT sendiri. Jadi prinsip kita adalah Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan menggunakan pestisida ramah lingkungan, termasuk dalam Gerdal (gerakkan pengendalian) OPT di lapangan," katanya.

Namun di sisi lain Takdir tak menapikkan penggunaan pestisida kimia jika memang kondisi serangan OPT sudah di atas ambang batas. Artinya, pengendalian OPT dengan pestisida kimia sebagai cara terakhir dan memperhatikan sesuai dengan kaidah tepat.

Direktur Perlindungan Hortikultura, Kementerian Pertanian, Sukarman juga mengatakan, pihaknya mendorong dan terus menyosialisasikan ke petani penggunaan pestisida nabati. Bahkan mengajak petani

menghasilkan dan mendaftarkan pestisida nabati tersebut.

"Kita sosialisasikan hingga tingkat bawah. Kita dorong menggunakan pestisida nabati. Kami akan ikuti aturan yang ada. Jika melanggar, kami tidak berikan rekomendasi. Kami tidak akan memberikan dukungan kalau tidak pestisida nabati," tegas Sukarman.

Untuk mendorong petani menerapkan pengendali hama yang ramah lingkungan, Sukarman menjelaskan, pihaknya membentuk Klinik PHT. Nantinya, kelembagaan petani di tingkat kecamatan berfungsi memproduksi bahan pengendali OPT ramah lingkungan, terutama agens hayati.

Klinik PHT juga berperan sebagai sarana konsultasi mengenai OPT yang menyerang tanaman, layaknya puskesmas. Saat ini total klinik PHT se-Indonesia baru 156 unit. Padahal berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, di Indonesia terdapat 7.230 kecamatan. "Hal tersebut masih jauh dari kondisi ideal, yakni satu kecamatan, satu klinik PHT," kata Sukarman.

Pendaftaran Pestisida

Sementara itu, Koordinator Fungsional Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Lolitha mengatakan, dengan makin berkembang penggunaan

pestisida nabati, pihaknya kini memberikan kemudahan dalam pendaftaran pestisida alami. Harapannya, agar animo pelaku usaha mendaftarkan pestisida alami semakin meningkat.

Dengan terdaptarnya pestisida, Lolitha mengatakan, akan menjamin mutu dan efektifitas pestisida yang diedarkan, melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida.

Tujuan lain adanya pendaftaran pestisida akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida. Selain itu, memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.

Dalam pendaftaran pestisida, ada tiga jenis izin. Pertama, izin percobaan. izin ini hanya berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 1 tahun. Namun, pestisida belum bisa diperjualbelikan.

Kedua, izin tetap yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Pestisida yang mendapat izin tetap sudah dapat diperjualbelikan. Ketiga, izin sementara yang berlaku selama 1 tahun. "Izin sementara ini hanya berlaku saat keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) di wilayah tertentu," tegasnya.

Sementara itu Ketua CropCare, Sudradjat Yusuf mengatakan, ledakan OPT dan adanya peredaran pestisida palsu menjadi musuh petani. Karenaitu, untuk membantu petani dalam penggunaan dan mengenalkan pestisida, pihaknya mempunyai kewajiban melakukan pelatihan.

CropCare pun kerap mengadakan diskusi dengan petani mengenai serangan OPT, kemudian melakukan pencegahan dan membuat demplot pengendalian dengan produk pengendali hama yang terdaftar. "Dalam kegiatan itu, kami juga bekerjasama dengan POPT dan penyuluh di BPP," ujarnya.

Sudradjat mengakui, akibat serangan OPT akan menyebabkan kehilangan produksi 26-40 persen setiap tahunnya. Apalagi kecenderungannya kini musim tanam yang tidak menentu, budidaya tanaman yang homogen dan terus menerus akan mempengaruhi ledakan OPT.

"Ledakan OPT dapat merugikan petani karena menjadikan tanaman puso. Sebagai pelaku usaha pestisida, kami bersama pemerintah menjadikan petani untuk merdeka dalam mengendalikan musuh-musuh tanaman," katanya. **Yul**

Crop Care Mitra Pemerintah dan Pendamping Petani

Penggunaan pestisida menjadi salah satu cara paling efektif mengatasi musuh petani yakni hama dan penyakit tanaman. Namun demikian, petani perlu mendapatkan bimbingan dalam mengaplikasikan. Siapa yang memberikan pendampingan?

Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku produsen dan distributor pengendali hama dan penyakit (pestisida) dalam negeri, Crop Care mempunyai kewajiban memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota dan petani. Berdiri tahun 2014 (d/h HMPN dan AP3I), Crop Care kini mempunyai 53 anggota (28 pabrikan dan 25 distributor) yang memegang pendaftaran pestisida dan pupuk.

"Visi dan tujuan kami adalah memajukan industri pupuk dan pestisida untuk kesejahteraan pertanian Indonesia. Karena itu, kami selalu memberikan pelatihan kepada anggota," kata Ketua Umum Crop Care, Sudradjat Yusuf saat webinar Petani Merdeka dari Musuh Tanaman yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan Crop Care.

Berkaca dari inilah, Crop Care Indonesia menghelat Pelatihan Quality Control bertema Menjamin Mutu Produk Pestisida dan Pupuk yang diproduksi dan atau diedarkan di Bogor beberapa waktu lalu. Dengan pelatihan quality control diharapkan anggota Crop Care bisa menghasilkan uji yang bisa dipertanggungjawabkan produksinya dan bisa menunjang *good laboratory practices*.

"Kita terus mengadakan capacity building agar bisa semakin mumpuni SDM di perusahaan pupuk dan pestisida yang menjadi

anggota Crop Care Indonesia. Agar mutu dan daya saing dari pupuk dan pestisida sesuai aturan perundang-undangan dan konsumen (petani)," katanya.

Sudradjat melihat pentingnya peranan Quality Control (QC) dalam pabrikan maupun distributor pupuk dan pestisida. QC adalah bagian dari Quality Assurance (Jaminan Mutu) yang bisa menjamin produk tersebut bermutu. Karena itu, tahapan harus dilalui mulai dari bahan baku, bahan kemasan, produksi dan lainnya. "Jadi jika terjadi komplain di tingkat konsumen, bisa kita telusur (trace) dari berbagai sisi," ujarnya.

Sudradjat mengatakan, Crop Care siap menjadi mitra bagi pemerintah, terutama dalam menyosialisasikan peraturan dan berpartisipasi aktif dalam mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Pihaknya kerap bekerjasama dengan Ditjen Tanaman Pangan dalam pengendalian hama dan penyakit di daerah. "Bersama pemerintah, Crop Care ingin menjadikan petani merdeka mengendalikan musuh tanaman," ujarnya.

Sebagai produsen pestisida Sudradjat menyadari, Crop Care mempunyai kewajiban melatih dan mendampingi petani melalui anggota dalam penggunaan pestisida. Bahkan hal itu sudah termasuk dalam AD/ART dan kode etik anggota Crop Care.

"Kami selalu menekankan pestisida merupakan produk yang penggunaannya harus dikawal, sehingga petani tidak salah dalam mengaplikasikan. Jadi kami tidak melepas produk hanya sampai agen atau distributor. Kami mengawal sampai ke lapangan," tuturnya.

Bantu Masalah Petani

Sudradjat mengakui, kendala yang dialami petani kini cukup banyak. Dari mulai perubahan iklim, kualitas benih, kelangkaan pupuk dan pestisida, pestisida palsu, ledakan serangan OPT dan harga hasil panen jatuh. "Kelangkaan dan mahalnya harga pestisida dan pupuk terjadi karena pengaruh krisis energi dunia yang mengganggu pasokan kedua bahan baku sarana produksi tersebut," katanya.

Karena itu Crop Care berharap ada kebijaksanaan Pemerintah dalam hal pendaftaran, terutama sumber bahan baku pestisida dan perbedaan generik dan paten. Apalagi adanya perang Rusia dan Ukraina dan memanasnya China dan Taiwan menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha pupuk dan pestisida. Kondisi global tersebut berdampak pada pasokan bahan baku. "Sudah saatnya Indonesia terlepas dari sumber bahan baku impor dengan kebijakan pemerintah mendorong



"SUDAH SAATNYA INDONESIA TERLEPAS DARI SUMBER BAHAN BAKU IMPOR DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENDORONG PRODUKSI DALAM NEGERI,"

menggunakan produksi dalam negeri," katanya.

Saat ini kata Sudradjat, pihaknya fokus mengawasi adanya modus pemalsuan, khusus pada produk yang laku di pasaran. Untuk mencegah pemalsuan, perusahaan anggota Crop Care selalu memperbaharui label, kemasan dan pembungkus untuk pengamannya, seperti nomer batch dan hologram. "Kami juga monitoring pada jaringan distribusi ditingkat lini paling bawah di lapangan, mengadakan *farmer meeting*, pelatihan *product stewardship*, sehingga petani mengetahui produk yang asli. Bahkan kami kerjasama dengan pengawas sipil dan aparat Polri," tuturnya.

Ke depan, menurut Sudradjat, benih terbaru, pestisida ramah lingkungan dan digitalisasi menjadi masa depan pertanian.

Yul

Bambang Sudjadi, PT. SANTANI : Banyak PR Pemerintah

Pertanian Indonesia mempunyai pekerjaan rumah (PR) cukup besar. Selain persoalan pengendalian hama, lahan pertanian yang kian menurun kesuburannya dan banyak lahan yang masam, hingga SDM penyuluh pertanian yang makin sedikit.

PT. Santani Agro Perkasa, Bambang Sudjadi mengatakan, banyak PR pemerintah dalam upaya membangun pertanian. Misalnya, dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman memang tidak lepas dari peran tenaga penyuluh dan POPT.

Namun fakta di lapangan, SDM-nya sangat kurang dibandingkan dengan lahan pertanian yang cukup luas.

"Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Pertanian agar SDM penyuluh dan POPT meningkat seperti dulu dan bergairah bekerja bersama pelaku usaha," kata Bambang.

Bambang mendukung pendekatan nabati dan alami. Namun demikian ia mengingatkan agar tidak boleh menapikkan unsur kimiawi atau anorganik, baik pupuk maupun pestisida. Sebab, jika ada wabah yang tak terduga,

maka peran pengendali kimiawi yang instans sangat penting.

"Saya lihat pestisida yang terdaftar di Indonesia relatif aman, baik dari sisi kesehatan manusia dan lingkungan," ujarnya. Jadi upaya pengembangan pestisida berbahan kimiawi jangan sampai dilupakan, meski dorongan pengembangan pestisida alami dan nabati juga penting. "Belajar dari industri farmasi, pengembangan herbal berjalan serasi dengan yang kimiawi," tambahnya. Yul



PHT, Senjata Melawan OPT

Hama dan tanaman menjadi musuh petani. Bahkan kadang petani justru terjajah organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Untuk memerdekakan petani dari musuh tanaman, upaya perlindungan tanaman menjadi sangat penting.



Namun tak mudah bagi petani bisa 'merdeka' dari hama dan tanaman. Berbagai cara dilakukan, termasuk penggunaan pengendali kimia. Sayangnya, hama dan penyakit tanaman tetap saja menyambangai lahan petani.

Data Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyebutkan, luas serangan OPT pada tanaman padi pada Januari-Juli 2022 mencapai 184.212 hektar (ha). Terbesar hama penggerek batang padi (PBP) seluas 51,630 ha, disusul tikus 42.011 ha, kresak 32.960 ha dan wereng batang cokelat 20.760 ha.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, M. Takdir Mulyadi mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hama dan tanaman. Faktor tanaman yakni, ketahanan/kerentanan tanaman, varietas yang ditanam, pertanaman monokultur.

Faktor patogen/hama juga ikut berpengaruh terhadap tingkat serangan OPT. Misalnya, kemampuan menginfeksi hama, jumlah inokulum/populasi hama, kemampuan atau kecepatan berkembang biak hama, serta ekologi hama atau penyakit.

"Cara penyebaran juga bisa meningkatkan serangan hama dan penyakit," katanya Webinar "Merdeka Petani dari Musuh Tanaman" yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan CropCare Indonesia, Rabu (10/08)

Faktor lingkungan seperti, kelembaban, curah hujan dan suhu/temperatur ikut berpengaruh terhadap serangan hama. Faktor manusia juga mempercepat serangan OPT. Misalnya, teknik budidaya, pemilihan varietas dan pemupukan. "Teknik



“JIKA JUMLAH OPT MELEBIHI AMBANG BATAS, MAKA PENGGUNAAN BAHAN KIMIA MENJADI CARA TERAKHIR DAN DIGUNAKAN BIJAKSANA SESUAI DENGAN KETENTUAN ENAM TEPAT,”

pengendalikan seperti menggunakan bahan kimia sintetik secara tidak bijaksana dapat memicu peningkatan serangan OPT," tambahnya.

Kelestarian Lingkungan

Takdir menegaskan, pihaknya concern pengendalian OPT dengan sistem PHT (Pengendalian Hama Terpadu) dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Penerapan PHT dalam pengendalian OPT memprioritaskan teknologi ramah

lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi. Sedangkan pestisida kimia sintesis merupakan cara terakhir dan digunakan secara bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT.

"Jika jumlah OPT melebihi ambang batas, maka penggunaan bahan kimia menjadi cara terakhir dan digunakan bijaksana sesuai dengan ketentuan enam tepat," katanya. Karena itu, lanjut Takdir, dalam pengendalian hama menggunakan pestisida kimia, petani harus diawasi.

Salah satu kegiatan dalam

PHT ungkap Takdir, adalah pemberdayaan petani dalam menyiapkan sendiri bahan pengendalian OPT dan pengendalian secara mandiri. Program tersebut melalui Pemberdayaan Petani dalam Masyarakat PHT (P4). Petani diberdayakan menghasilkan dan mengaplikasikan agens pengendali hayati dalam pengelolaan OPT.

"Mereka (petani) dibimbing untuk mencari isolat insitu/spesifik lokasi untuk Agensi Pengendali Hayati (APH). Lebih efektif jika isolat tersebut dari daerah itu sendiri," tuturnya. Sejak tahun 2021, P4 sudah dikembangkan menjadi 270 unit di kelompok-kelompok tani seluas 25 ha. Bahkan di beberapa tempat sudah direplikasikan.

Untuk penerapan PHT, Takdir mengatakan, pihaknya melakukan pelatihan secara periodik ke petani. Selain itu, pemberian isolat dan pengaplikasiannya di lapangan melalui program Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan OPT ramah lingkungan.

"Alumni Sekolah Lapang PHT (SL-PHT) yang sudah pintar membuat agensi hayati juga dilibatkan dalam Pemberdayaan Pos Pelayanan Agensi Hayati (PPAH) dan Pengembangan APH, baik di

PPAH maupun di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)," tuturnya.

Mengenai strategi perlindungan, Takdir menjelaskan penguatan yang perlu dilakukan adalah melalui pengamatan untuk pengendalian preemtif. Selain memberdayakan petani, pemerintah melalui petugas POPT memberikan pendamping. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) juga menjadi tempat belajar petani sekaligus isolate agensi hayati.

Percontohan Budidaya Sehat melalui demplot budidaya padi juga menjadi program pemerintah mendorong pertanian ramah lingkungan. Dalam budidaya padi sehat, Takdir mengatakan, petani diajarkan menggunakan input sarana produksi organik. Untuk tahun 2022 ada 15 ribu ha demplot penerapan budidaya tanaman sehat.

"Kita berikan contoh kepada petani dalam pengelolaan ekosistem dari tanahnya, benihnya, berbudidaya dengan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati dan pestisida biologi," tuturnya.

Takdir mengakui, ketika petani mencoba beralih ke pertanian ramah lingkungan dengan penggunaan hayati memang awalnya produksi turun. Namun pada musim tanam berikutnya, produktivitas akan lebih tinggi karena mikroorganisme baik meningkat. "Dengan membuat sendiri pupuk hayati dan pestisida nabati, terjadi pengurangan ongkos produksi yang akhirnya meningkatkan pendapatan petani," tambahnya.

Karena itu Takdir optimis, melimpahnya sumberdaya alam seperti serangga, cendawan, bakteri, virus dan nematoda dapat digunakan sebagai bahan pengendali hayati. Berdirinya Pusat Pelayanan Agensi Pengendali Hayati (APH) dan kelompok tani bisa menyebarkan virus pertanian ramah lingkungan menjadi lebih meluas dan mampu memerdekakan petani dari berbagai jenis hama tanaman. Sekaligus tanaman lebih sehat dan berkelanjutan. **Gsh/Yul**

Pestisida Nabati, dari Petani untuk Petani



Penggunaan pestisida nabati menjadi salah satu langkah alternatif bagi petani dalam melindungi tanaman dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Bahkan pemerintah melalui Direktorat Perlindungan Hortikultura mengajak petani menghasilkan sendiri pengendali hama dan penyakit tersebut.

Direktur Perlindungan Hortikultura, Kementerian Pertanian, Sukarman dalam webinar Merdeka Petani dari Musuh Tanaman yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan CropCare, Rabu (10/8), mengatakan, selain mendorong petani/kelompok tani untuk menggunakan dan memproduksi pestisida hayati, pihaknya juga mendorong petani/kelompok tani untuk mendaftarkan pestisida hayati.

Hal tersebut dilakukan agar pestisida hayati tersebut bisa diperjualbelikan dan petani bisa mendapatkan keuntungan. "Kami sudah mensosialisasikan di tingkat bawah. Kami tidak perkenankan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang kami dorong adalah

nabati/hayati yang ramah lingkungan," ungkapnya.

Bahkan Sukarman menegaskan, pihaknya juga mengajak petani yang ingin mendaftarkan produk pestisida nabati untuk mengikuti aturan yang ada. Bahkan dirinya menegaskan, tidak memberikan dukungan, kecuali menggunakan agensi hayati yang ramah lingkungan untuk mengatasi hama dan penyakit.

Dalam melindungi petani dari musuh tanaman, Direktorat Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian memiliki berbagai strategi. Mulai dari peningkatan penerapan Pengendalian Hama Tanaman (PH), optimalisasi gerakan pengendalian OPT hortikultura, peningkatan peran kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura dan

pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perlindungan Hortikultura.

"Kami juga telah mensinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO, penanganan dampak perubahan iklim hortikultura, dan pemasyarakatan perlindungan hortikultura," katanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perlindungan Hortikultura memiliki unit pelayanan di daerah mulai dari UPTD BTPPHP di 32 Provinsi, 108 unit LPHP/LAH, 156 unit Klinik PHT dan 3.295 PNS/THL yang siap membantu para petani di lapangan.

Di lapangan BTPPHP memiliki peran sebagai ujung tombak Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, penyediaan data OPT dan DPI, penyediaan data sebagai Early Warning System (EWS) di bidang proteksi tanaman sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengamanan produksi dan institusi pelayanan publik terkait perlindungan tanaman.

Sedangkan LPHP/LAH memiliki peran dalam pembuatan starter agens hayati (F1), eksplorasi APH dari lapangan, perbanyak agens hayati, pembuatan pestisida nabati, pengujian mutu agens hayati, uji efikasi pestisida sintesis maupun nabati. "LPHP juga menjadi pusat kajian pengendalian OPT ditingkat Kabupaten, dan pengumpul data OPT dan DPI dari Kortikab," katanya.

Klinik PHT

Mendorong petani memproduksi pestisida nabati, Sukarman mengatakan, pemerintah mengajak petani membangun Klinik Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Klinik ini

menjadi kelembagaan petani di tingkat Kecamatan yang berfungsi memproduksi bahan pengendali OPT ramah lingkungan, terutama agens hayati. "Klinik PHT juga berperan sebagai sarana konsultasi mengenai OPT yang menyerang tanaman, layaknya puskesmas," katanya.

Karena itu, pemerintah memberikan bantuan fasilitasi klinik PHT, seperti sarana produksi agens hayati seperti kulkas, kompor, kulkas, panci, drum, dan bahan pendukung lainnya. Berbagai bahan pengendali OPT yang diproduksi klinik PHT antara lain trichoderma atau trichokompos, pestisida nabati, pupuk organik, PGPR dan agens hayati lainnya.

Saat ini total klinik PHT se-Indonesia 156 unit dan total kecamatan di Indonesia mencapai 7.230 unit. Namun Sukarman mengakui, jumlah tersebut masih jauh dari kondisi ideal, untuk mewujudkan satu kecamatan-satu klinik PHT.

Penerapan pengelolaan hama terpadu (PPHT) juga menjadi salah satu langkah Direktorat Perlindungan Hortikultura. Kegiatan PPHT menjadi sarana penyebarluasan teknologi pengendalian OPT bersifat lokal dan ramah lingkungan. Pembelajaran dan pelatihan pengelolaan OPT dilaksanakan selama satu musim yang setara dengan 10 kali pertemuan.

"Ilmu yang dipelajari dalam PPHT antara lain pengamatan agroekosistem dan teknik budidaya ramah lingkungan, pengenalan dan pengamatan OPT, pembuatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, dan penguatan kelembagaan kelompok tani," tutur Sukarman. **Herman/Yul**

Lebih Efektif dengan Gerdal

Berbagai kegiatan perlindungan tanaman terus dilakukan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Diantaranya, Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Hortikultura yang menjadi salah satu upaya mendukung keamanan produksi hortikultura. Pelaksanaan Gerdal agar populasi OPT terkendali dan tidak menyebabkan kerusakan lebih luas.

Dalam Gerdal OPT melibatkan petani, petugas POPT, LPHP, BTPPH, dan dinas pertanian. Kegiatan ini juga menjadi sarana transfer ilmu pengendalian OPT ramah lingkungan kepada petani-petani lainnya. "Kegiatan gerdal OPT hortikultura ini menggunakan bahan pengendali OPT ramah lingkungan," kata Direktur Perlindungan Hortikultura, Kementerian Pertanian, Sukarman.

Penerapan pengelolaan OPT skala luas dalam kegiatan Gerdal bertujuan memenuhi persyaratan SPS-WTO untuk pasar ekspor. Beberapa persyaratan teknis SPS - WTO antara lain *Pest list* OPT, hasil analisa residu pestisida dibawah Batas Maksimum Residu (BMR) terhadap produk hortikultura ekspor (Singapore, Eropa, Jepang, Australia, Amerika, New Zealand), perlakuan Hot Water Treatment (HWT) dan Vapour Heat Treatment (VHT) dan Perlakuan iradiasi gamma.

Karena itu menurut Sukarman, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen Pemerintah Daerah, kesadaran petani, dukungan masyarakat dan gerakan masyarakat. **Herman/Yul**

Nurul Ihsani : Merdeka Finansial Karena Pertanian

Berbekal keyakinan bahwa Pertanian itu bisnis yang menjanjikan, Young Ambassador asal Cianjur, Jawa Barat bernama Nurul Ihsani ini mencoba terjun di bisnis olahan. Kini, dirinya mampu merdeka finansial dari olahan keripik pisang yang menghasilkan omset Rp14 juta setiap bulannya.

Berawal dari keinginannya memiliki penghasilan sendiri, gadis cantik asal Warung Jambe, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur ini memutar otak mencari peluang emas yang bisa ditekuni selama menjadi mahasiswa.

Awal 2020, badai COVID 19 datang dan menghantam perekonomian keluarganya karena permintaan pisang yang menurun. "Awalnya coba-coba, punya modal Rp 300 ribu lalu pisang yang dipanen bapak, saya jadikan keripik dikemas lalu saya jual, baik secara langsung juga melalui online," kata Nurul.

Dirinya mengaku tidak menyangka keripik pisang yang diproduksi kini menjadi familiar. Meskipun, kata Nurul, sempat kurang optimis dalam menjalankan usahanya tersebut.

"Pada bulan ke dua di tahun 2021 kemarin, saya juga sempat panik karena barang banyak yang beli

tapi tiba-tiba dibulan berikutnya sempat sepi pembeli," ucapnya.

Nurul mengaku usaha yang ditekuninya itu sudah berjalan kurang lebih 15 bulan dengan rata-rata omset Rp 14 juta per bulan. "Dari omset pertama saya punya Rp 300 ribu, lalu punya omset di bulan ke dua Rp 4 juta hingga Rp 5 juta. Sekarang di tahun 2022 ini omsetnya sudah mencapai Rp 14 juta," katanya.

Lebih lanjut Nurul mengatakan, saat keripik pisang miliknya akan dipasarkan ke toko ritel, sempat diminta persyaratan mulai dari hasil olahan hingga izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

"Sudah saya urus semua, bahkan PIRT pun sudah ada. Sekarang alhamdulillah sudah bisa bekerjasama dengan pemasaran online salah satunya marketplace Shopee," ujarnya.

Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Nurul merasa bangga

karena sudah tidak lagi minta uang jajan kepada orangtuanya. Terlebih dirinya saat ini masih kuliah semester akhir. "Alhamdulillah, asalkan ada niat dan keinginan yang kuat pasti bisa terwujud. Yang pasti segala sesuatunya butuh proses," katanya.

Dari proses tersebut, Nurul mengaku mempelajari bahwa pertanian memiliki peluang emas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh milenial. "Untuk usaha keripik pisang ini saja misalnya, bukan hanya bisa meningkatkan pendapatanku, tetapi juga Petani Pisang di sekitar yang hasil panennya bisa dibeli, membantu orang-orang sekitar untuk mempunyai pekerjaan, bahkan mitra reseller kita yang bisa memiliki penghasilan dari bisnis ini," tuturnya.

Nurul juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Petani muda milenial yang turut mengambil peran untuk Pertanian



Indonesia. Bahkan menurutnya, sudah saatnya anak muda Indonesia banyak berperan bukan baperan. Untuk memanfaatkan peluang-peluang baru untuk sekitar, membuka lapangan pekerjaan baru agar semakin produktif dan menghasilkan sehingga banyak Masyarakat sejahtera **Nattasya/Gsh**

PUPUK ORGANIK CAIR

EM4

HEMAT BIAYA
PANEN BERLIPAT
GANDA

TEKNOLOGI FERMENTASI
BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fixasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.



L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Kadar Hara Pupuk
C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
N = 0,07 % ; P₂O₅ = 3,22 ppm;
K₂O = 7675,0 ppm; Ca = 1676,25;
Mg = 597,0 ppm; B < 20 ppm;
Cu < 0,01 ppm; Mn = 3,29 ppm;
Fe = 5,54 ppm; Zn = 1,90 ppm;

Mikroba:
Lactobacillus = 8,7 x 10⁵ sel/ml;
Pelarut Fosfat = 7,5 x 10⁶ sel/ml;
Yeast/Khamir = 8,5 x 10⁶ sel/ml;

Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

KANTOR PEMASARAN :
JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH : Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR : Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail: slpjatim@em4-indonesia.com
BALI : Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

Web: www.em4-indonesia.com
Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

AGRITIPS

Apa Itu Agensia Hayati?



Saat ini mulai banyak pegiat yang mensosialisasikan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan aman, salah satunya dengan agen hayati. Agen hayati adalah organisme berupa jamur, bakteri, virus, nematoda, serangga, serta hewan lainnya yang berguna mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Agen hayati sudah tersedia di alam, tetapi keberadaannya tidak seimbang. Oleh karena itu,

pembudidaya perlu menambah populasinya di lapangan.

Pada dasarnya agens hayati dibagi menjadi 4 Kelompok yaitu Predator (Harimau, Kucing, burung, laba-laba, Kumbang, Capung, Lalat), Parasitoid (serangga yang hidupnya menumpang pada atau didalam tubuh inang hama dan menghisap cairan tubuh hama), Patogen serangga (bakteri, cendawan, virus) dan antagonis patogen tumbuhan. **NATTASYA/Gsh**

Cerita Manis Petani di Lokasi IPDMIP

Proyek Integrated Parsipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) menjadi salah satu upaya pemerintah mengungkit kapasitas dan kelembagaan petani. Setidaknya ada tiga program utama dalam proyek tersebut yakni, sekolah lapang (SL), memperbaiki rantai pemasaran dan literasi keuangan untuk petani.



Proyek yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ADB-IFAD ini berlangsung sejak 2017-2022. Program yang dilakukan secara simultan selama 5 tahun ini diharapkan dapat menyentuh 4 juta petani penggarap dan pemilik lahan di 74 Kabupaten dalam 16 Provinsi dengan luas 2,5 juta hektar (ha).

Untuk mendukung IPDMIP, Indonesia mendapat bantuan pendanaan dari ADB/AIF sebesar 600 juta dollar AS dan dari IFAD sebesar 100 juta dollar AS. Bantuan ADB/AIF untuk mendanai kegiatan rehabilitasi, peningkatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sistem irigasi. Sedangkan pendanaan IFAD untuk kegiatan peningkatan program penyuluhan, akses pelayanan keuangan, efisiensi pola tanam dan rantai hasil.

Setelah hampir berjalan lima tahun, kegiatan IPDMIP kini mulai dirasakan petani manfaatnya. Seperti Wasikin. Ketua Kelompok Tani Cayut Indah yang tinggal di Desa Suka Selamat, Kecamatan Kroya, Indramayu ini mengaku, menjadi bagian program IPDMIP merupakan berkah sendiri untuk petani dan kelompoknya. Petani yang awalnya tidak mengetahui bagaimana mengelola lahan, kini mulai tersadarkan bagaimana

memperlakukan tanah dengan baik.

"Ada dampak positifnya (program IPDMIP,red). Sebelumnya saya tidak tahu apa itu pH tanah, kadang semau petani menggarap tanahnya. Tapi, sekarang petani tahu pH tanahnya ternyata di bawah 4. Ini yang membuat air cepat hilang saat ada hujan," tutur Wasikin dengan logat Indramayunya saat Tabloid Sinar Tani berkunjung ke BPP Kroya, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya dalam mengelola tanah, Wasikin mengakui, petani juga mulai mengerti dalam memberikan pupuk dan mengendalikan hama. Sebab, dalam sekolah lapang IPDMIP petani diajarkan membuat pupuk organik dan pengendalian hama nabati.

Apalagi ia mengakui, pasokan pupuk subsidi sangat langka. Karena ketergantungan petani dengan pupuk kimia sudah tinggi, petani membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Akibatnya biaya usaha tani menjadi mahal. Namun bagi petani yang tidak memiliki dana cukup, hanya memberikan pupuk seadanya sesuai 'kantong'.

Dalam proyek IPDMIP ungkap Wasikin, petani juga mendapat pelajaran mengatasi hama dan penyakit. Bagaimana mendeteksi

hama sebelum menyebar dan melakukan pencegahan sedini mungkin. Dengan SL IPDMIP, kini produktivitas padi juga mulai terdongkrak naik.

"Harapan saya, program ini dapat dilanjutkan karena bermanfaat bagi petani, termasuk bagaimana mengajarkan manajemen keuangan. Sekarang ini yang terjadi dalam mengelola keuangan, masih besar pasak dari tiang," ujarnya.

Mampu Dirikan Koperasi

Perbaikan kapasitas petani juga dirasakan Nurdin, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mandiri, Kecamatan Gabus, Kabupaten Indramayu. "IPDMIP membantu meningkatkan pengetahuan petani, misalnya dalam penggunaan pupuk berimbang. Selama ini ternyata banyak petani belum tahu. Begitu juga mengenai hama dan penyakit, petani kini tidak lagi tergantung pestisida kimia," tuturnya.

Dengan letak sawah petani yang berada di aliran irigasi bagian akhir, Nurdin mengaku, petani selama ini kesulitan dalam pengairan. Namun dengan program IPDMIP, persoalan pengairan bisa dikurangi. Petani kini mengatasi keterbatasan air dengan irigasi perpompaan.

"Kalau dulu, petani hanya panen satu jali, sekarang bisa panen dua

kali, bahkan ada yang sampai tiga kali. Ada juga petani yang kini menanam hortikultura," katanya.

Pelajaran lain yang Nurdin dapatkan dari program IPDMIP adalah petani kini paham dalam mengaplikasikan pestisida. Awalnya, petani tidak pernah memperhitungkan pemberian pestisida. Namun dengan adanya SL, petani mulai mengerti dan tidak boros dalam penyemprotan pestisida. "Petani diajarkan memantau perkembangan hama dan penyakit di lapangan," ujarnya.

Petani lanjut Nurdin juga kini mengetahui bagaimana mempersiapkan benih untuk pertanaman. Sebelumnya, petani tidak pernah menyeleksi benih yang dibeli, tapi dengan SL petani bisa memilih benih unggul dan tahan penyakit.

Poktan Mandiri juga sudah bisa membentuk koperasi. Dengan modal yang dimiliki anggota, koperasi bisa membuat kios sarana produksi dan menangani penyewaan alat mesin pertanian (alsintan), serta kegiatan simpan pinjam. "Interaksi petani yang satu dengan yang lain juga makin kuat. Petani yang kesulitan modal, kami bantu dengan sistem bayar setelah panen. Hasilnya pun petani nikmati bareng-bareng," tambah Nurdin.

Pembinaan dalam kegiatan IPDMIP juga mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani. Misalnya, Poktan yang sebelumnya mendapatkan bantuan satu unit alsintan traktor roda dua, kini telah berkembang memiliki lima unit traktor roda dua. "Kita ada subsidi untuk anggota koperasi yang mau meminjam atau menyewa alsintan, karena alsintan milik kelompok," ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Kroya, Warman mengatakan, tujuan proyek IPDMIP memang untuk menyejahterakan petani. Beberapa kegiatan IPDMIP yakni sekolah lapangan. Petani mendapatkan bimbingan perbaikan struktur tanah, bagaimana komponen pembuatan pupuk organik, cara perbaikan tanah, dan seleksi benih padi.

"Kami mengajarkan petani perbaikan tanah dengan teknologi pupuk organik atau pupuk kandang di lahan petani. Perbaikan tanah di Kecamatan Kroya menjadi sangat penting, karena lahan sawah sudah asam, karena penggunaan pupuk kimia berlebihan," tuturnya.

Kegiatan lainnya ungkap Warman, petani diajarkan rantai nilai sistem usaha tani. Dari bimbingan tersebut, harapannya petani bisa paham apakah hasil panennya dijual ke tengkulak atau ke pasar, apa di pakai sendiri. "Solusi dari program IPDMIP, petani bisa mengolah sendiri dan dijual dalam bentuk beras, tidak gabah lagi," katanya. **Yul**

Bangun Kesadaran Petani Cara Bertani hingga Kelola Keuangan



Cerita manis petani di lokasi IPDMIP bukan hanya di Kabupaten Indramayu, petani di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, juga berharap ada kelanjutan program tersebut. Pasalnya, program tersebut sangat membantu masyarakat desa, khususnya petani.

“Petani butuh charge,” kata Ketua Kelompok Tani Warga Saluyu I, Indra yang tinggal di Desa Tambakbaya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Petani yang berada di daerah irigasi (BI) Bantar Wangi ini mengakui, program IPDMIP sangat membantu petani dalam berbudidaya tanaman. Apalagi, petani di wilayahnya ini menggarap lahan sempit dan umumnya tegalan.

“Jika saya ibaratkan petani disini itu rata-rata baru tahapan bisa, tapi belum mengerti. Artinya petani hanya bisa menanam, tapi tidak mengerti bagaimana berbudidaya yang baik,” tuturnya.

Anggota Kelompok Tani Warga Saluyu sebanyak 25 orang yang umumnya petani padi. Sebagian besar bukan pemilik lahan, tapi penggarap yang luasnya juga sangat sempit hanya 1 bata (0,14 ha). Setiap tahun petani hanya satu kali panen dengan hasil 1,5 kuintal.

Pendapatan petani dari 0,14 ha hanya sekitar Rp 1,5 juta. Karena itu yang sebagian bekerja sebagai kuli bangunan dan ojek. Lahan pertanian di Desa Tambakbaya juga tidak luas hanya 14 ha dengan populasi hanya sekitar 330 KK lahan. Bahkan desa tersebut masuk dalam kategori rawan pangan. “Kalau kami mengharapkan dari bertani berat, jika tidak ada tambahan penghasilan lainnya,” ujarnya.

Karena itu adanya Sekolah Lapangan (SL) dalam proyek IPDMIP, Indra mengakui, petani bisa mendapatkan tambahan pengetahuan. “Keinginan kami, pemerintah bisa terus membimbing petani, sehingga ke depan petani bisa meningkatkan

tarap hidup dari pertanian,” harap Indra.

Di Kabupaten Kuningan ada 9 DAS (daerah aliran sungai). Kelompok yang sudah mengikuti SL di lokasi daerah irigasi ada 80 kelompok. Pada tahun 2022 ada sebanyak 39 kelompok yang terbagi tahap 1 sebanyak 20 kelompok dan tahap 2 pada Oktober mendatang sebanyak 19 kelompok.

Koordinator BPP Kecamatan Garawangi, Eries Nugraha mengatakan, petani sangat terbantu dengan SL IPDMIP. Pasalnya, petani mendapat bimbingan dalam pola tanam dan mengatasi masalah kelangkaan pupuk. “Kalau ditempat kami, program IP400 tidak bisa dilakukan, karena kondisinya memang tidak memungkinkan,” ujarnya.

Selain pelatihan cara budidaya tanaman yang baik, Eries mengungkapkan, petani juga mendapat bimbingan mengenali informasi pasar. Selama ini dalam pemasaran tengkulak mempunyai peran besar dalam membeli hasil panen petani.

“Kami juga memberikan pelatihan edukasi literasi permodalan. Petani diajarkan menghitung keuangan dan gizi pangan. Memang program paling terasa adalah sekolah lapangan. Sedangkan literasi keuangan belum masif kami lakukan,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Nono Suryono, pendamping IPDMIP di Kecamatan Kroya, Indramayu mengatakan, kegiatan dalam program IPDMIP adalah SL, pengetahuan pementaan rantai nilai, pelatihan literasi dan keuangan. “Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan hasil pertanian di daerah irigasi. Disini sudah terlihat ada peningkatan dari

sebelumnya 6-7 ton gabah kering giling,” katanya.

Untuk saat ini Nono mengakui, saat ini fokus memberikan pelatihan petani melalui SL dan literasi keuangan. Dalam program SL IPDMIP petani juga mendapatkan pelatihan seleksi benih, pengamatan hama penyakit, pembuatan pestisida nabati dan cara uji tanah sebelum tanam.

Namun menurutnya, kegiatan akan lebih efektif dengan SL, terutama dari segi komunikasi ke petani. Jadi selain pemberian materi, juga ada kunjungan lapangan. “Jika saat budidaya kelihatan ada gejala, kemudian kita bisa langsung dan jelaskan ke petani. Kita kasih tahu gejalanya. Misalnya, blas daun dan patah leher,” ujarnya.

Untuk pelatihan rantai pasar, Nono mengatakan, penyuluh sudah mengadakan workshop dengan mendatangkan petugas lapangan. Misalnya, untuk membantu memasarkan gabah petani, petugas lapangan mendata pemilik penggilingan padi. Kemudian menggandeng mereka bekerjasama dengan petani untuk membeli hasil panen.

Bangun Kelompok Tani

Sementara itu Tim Evaluasi IPDMIP, Mulyono Machmur mengingatkan, untuk meningkatkan posisi tawar, khususnya dalam pemasaran hasil, petani harus berkelompok. Untuk itu, petani harus mengetahui manfaat berkelompok itu.

“Selain menaikkan nilai tawar petani, dengan berkelompok petani juga bisa mudah dalam membeli sarana produksi dan harganya juga bisa jauh lebih murah. Begitu juga dalam penerapan teknologi, panen, pengendalian hama dan

permodalan,” tuturnya.

Selain masalah budidaya padi, Mulyono melihat, permodalan bagi petani juga masih menjadi masalah besar. “Kalau soal teknologi sudah selesai. Masalah lain yang belum juga selesai adalah permodalan. Petani masih berat permodalan belum ada solusi. Sekarang pemerintah memberikan KUR. Ini boleh petani coba,” kata mantan Kepala Pusat Penyuluhan tersebut.

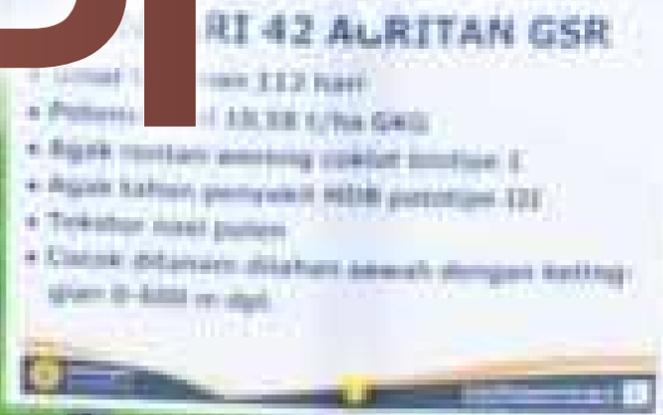
Namun demikian, Mulyono menengarai, banyak petani yang belum bisa mengakses KUR karena masih ada masalah diperbankan, terutama tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) pada masa lalu. “Karena pengalaman KUR petani menunggak, sekarang tidak bisa pinjam lagi,” ujarnya ketika memantau pelaksanaan proyek IPDMIP di Kabupaten Indramayu dan Kuningan.

Hal lain yang menjadi sorotan Mulyono adalah masalah pemasaran hasil yang hingga kini belum tertangani dengan dengan baik. Karena itu ia berharap ke depan, proyek IPDMIP lebih fokus pada masalah tersebut.

Untuk itu, Mulyono menyarankan harus ada pelatihan untuk penyuluh dalam menggerakkan petani dan membangun kepemimpinan petani. “Penyuluh harus bisa mengajak petani berkelompok. Dengan berkelompok semua kegiatan lebih efisien, baik dalam membeli pupuk maupun menjual hasil,” katanya.

“Penyuluh juga harus diajarkan kepemimpinan,” tambahnya. Karena penyuluh adalah proses memberikan pendidikan kepada orang dewasa, penyuluh harus mengetahui trik dan tipsnya. Pelatihan kepemimpinan bagi penyuluh seharusnya menjadi perhatian pemerintah juga. **Yul**

Info MPPI



Benih dan Krisis Pangan

Tantangan pangan global kini kian besar. Bukan hanya pengaruh pandemi Covid-19, tapi juga perang Rusia-Ukraina menjadi problem tersendiri. Bahkan beberapa negara mulai mengurangi ekspor pangan guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Guna menjamin peningkatan produksi pangan, peran perbenihan menjadi sangat penting. Presiden Joko Widodo pun sempat menyinggung persoalan pengembangan benih dalam negeri, karena sangat penting dalam meningkatkan produksi padi nasional. Bahkan Indonesia sebagai negara besar harus mampu menguatkan sektor pangan agar terhindar dari kemungkinan adanya krisis pangan global.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar pengembangan benih tidak hanya terfokus pada benih padi, melainkan juga benih lain seperti singkong, sagu, sorgum dan

jagung agar dapat dikembangkan untuk mendukung substitusi pangan lokal. "Perlu saya tekankan bahwa jangan juga kita ketergantungan hanya satu beras, tetapi kita masih bisa mengembangkan yang namanya sagu, sorgum, porang, jagung, ketela pohon dan lain-lainnya ini masih memiliki peluang untuk kita tingkatkan produksinya," pintanya.

Peran benih di tengah ancaman krisis pangan global juga mendapat sorotan tajam dalam Munas Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) di Jakarta, Jumat (12/8). Ketua Umum MPPI, Herman Khaeron melihat, pangan kini menjadi masalah, bukan hanya Indonesia tapi juga global. Apalagi bangsa Indonesia mempunyai pengalaman buruk dalam persoalan pangan. "Karena itu kita harus mampu meningkatkan produksi pada posisi aman. Artinya, produksi bukan hanya break event atau impas," katanya.

Tantangan produksi pangan akhir-akhir ini memang kian diperparah dengan pandemi Covid-19 dan perang konvensional Rusia-Ukraina. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pangan dunia dan energi, bahkan multiplier efek sangat besar. Bahkan kini harga beberapa komoditas pangan, bukan hanya yang sifatnya primer tapi juga sekunder melonjak.

Tantangan lainnya adalah kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 1,4 persen pertahun akan meningkatkan kebutuhan pangan. "Sejak dulu Pemerintah Indonesia selalu menggaungkan swasembada pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Semua ini karena kita, bangsa Indonesia adalah pemakan beras terbesar di dunia," tegas Ketua Dewan Pembina MPPI, M. Jafar Hafsa. Bagaimana bisa meningkatkan produksi pangan, apalagi di tengah ancaman krisis pangan? Kuncinya ada pada benih. **Yul**



H.E. Herman Khaeron, Ketua Umum MPPI:

MPPI, Wadah Pemberi Solusi Pangan



Filosofi sapu lidi di tengah krisis pangan global mestinya dihayati semua pihak. Bagaimana pun, krisis tersebut tidak bisa dihadapi sendiri, siapa pun itu. Tanpa adanya kebersamaan, bangsa Indonesia akan sulit melewati ancaman krisis pangan.

Karena itu, kehadiran Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) diharapkan menjadi perekat pelaku di dunia perbenihan dan perbibitan dalam negeri. Bukan hanya industrinya, tapi juga pemerintah dan lembaga penelitian di perguruan tinggi. Bersatu meningkatkan produksi pangan.

Ketua Umum MPPI terpilih, H.E. Herman Khaeron berharap, sebagai sebuah forum, MPPI harus menjadi pengikat untuk berdiskusi, melahirkan ide dan gagasan, bahkan menampung curahan hati seluruh pihak di dunia perbenihan dan perbibitan tanah air.

"Jadi sebagai organisasi naungan, harusnya MPPI menjadi organisasi perjuangan, baik sektor perbenihan maupun pertanian. Bahkan menjadi wadah yang melahirkan solusi bagi bangsa," katanya saat Musyawarah Nasional MPPI di Jakarta, Jumat (12/8).

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengingatkan kelahiran MPPI jangan menjadi pesaing dengan organisasi lain yang bergerak dalam dunia perbenihan dan perbibitan. Jika selama ini MPPI hanya menampung pelaku usaha di industri perbenihan, maka ke depan Herman akan merangkul kalangan peneliti di perguruan tinggi.

"Sebagai forum MPPI ke depan tidak perlu terstruktur ke bawah di daerah, tapi yang perlu digandeng sekarang adalah perguruan tinggi. Dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kekuatan masyarakat perbenihan. Bahkan menjadi lembaga yang

menggodok berbagai persoalan dalam perbenihan dan perbibitan," tuturnya.

Kepada industri perbenihan dalam negeri, Herman berharap agar terus berinovasi menghasilkan varietas unggul baru untuk mengkonversi benih yang selama ini masih impor. Namun di sisi lain, ia juga meminta dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri dalam bentuk regulasi. "Permudah ijin pelepasan, jangan mempersulit industri benih," tegasnya.

Dengan peran penting benih dan bibit dalam peningkatan produksi pangan, Herman menyesalkan ketika alokasi anggaran untuk perbenihan senilai Rp 1,5 triliun tidak ada lagi.

Karena itu ia berharap, pemerintah kembali mengalokasikan bantuan benih dan bibit kepada petani/peternak. "Padahal ketika suasana bangsa kurang baik dengan adanya Covid-19, justru pelaku perbenihan dan perbibitan tetap jalan. Ini jadi spirit baru bagi dunia pertanian," ujarnya.

Hal lain yang akan menjadi prioritas Herman ke depan adalah bagaimana MPPI bisa ekspansi bekerjasama dengan negara lain dan perguruan tinggi. Ia menilai, keberadaan perguruan tinggi dan kerjasama dengan luar negeri sangat strategis dalam pengembangan dunia perbenihan dan perbibitan Indonesia.

Selain itu, politisi Partai Demokrat itu melihat ke depan

industri perbenihan masuk dalam bagian agroindustri. Karena belum menjadi bagian dalam bidang agroindustri, menyebabkan industri benih menggantung. "Sebagai industri, tapi justru berada di luar," katanya.

Krisis Pangan

Menghadapi krisis pangan global, Herman mengatakan, pemerintah harus bisa cepat mengantisipasi karena harga komoditas pangan cenderung naik dan sulit turun kembali. Apalagi kondisi pangan diperparah perubahan iklim dan adanya perang Rusia dan Ukraina, sebagai negara penghasil gandum dunia.

"Padahal kita impor gandum cukup besar," ujarnya. Untuk itu, Herman menyarankan agar ke depan pemerintah kembali mendorong program diversifikasi pangan dengan mengonsumsi pangan lokal. Selama ini masyarakat Indonesia justru diversifikasi pangannya ke produk berbahan baku gandum, seperti mie dan roti gandum.

Menurutnya, bangsa Indonesia juga tidak boleh tergantung pada satu komoditas yakni beras. Untuk itu, pemerintah harus kembali mendorong diversifikasi pangan dengan meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal. Saat ini ia melihat, banyak pangan lokal yang mulai langka.

"Kita harus kembali ke komoditas asli Indonesia, pangan lokal. Kalau kita mendorong pengembangan pangan lokal, masyarakat akan banyak pilihan produk pangan. Masyarakat kita tidak paksakan untuk mengonsumsi pangan lokal, tapi kita berikan pilihan dan alternatif," tuturnya. **Yul**



M. Jafar Hafsa: Benih Awal Kehidupan

Tak ada pangan tanpa benih. Ungkapan tersebut saat tepat untuk mendapat perhatian serius saat dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan. Benih memang menjadi faktor penting dalam upaya menggenjot produksi pangan.

"Benih dan bibit adalah awal kehidupan," kata Ketua Dewan Pembina Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) saat Musyawarah Nasional MPPI di Jakarta, Jumat (12/8).

Bagi mantan Dirjen Tanaman Pangan ini, kehidupan semua bermula dari benih dan bibit. Bahkan tidak ada pangan, tanpa perbenihan dan perbibitan. "Ini menjadi sebuah justifikasi dan alasan mengapa begitu penting benih dan bibit," ujarnya.

Bukan hanya itu, benih adalah kunci utama dalam peningkatan produksi pangan. Dengan demikian peran benih sangat penting ketika bangsa dunia dan Indonesia tengah menghadapi krisis pangan global. Adanya krisis pangan kini banyak negara

yang menahan pangan untuk keamanan dalam negeri sendiri.

"Sejak dulu pemerintah Indonesia mendorong swasembada pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Apalagi penduduk Indonesia keempat terbesar di dunia dan pemakan beras terbanyak di dunia," tuturnya.

Untuk itu Jafar meminta pelaku usaha perbenihan dan perbibitan yang tergabung dalam MPPI untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul. Teknologi bibit dan benih adalah teknologi canggih, bahkan mengalahkan teknologi pesawat terbang.

"Teknologi pertanian terkait makhluk hidup. Semuanya itu dimulai dari benih dan bibit. Tanpa benih dan bibit yang baik, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan pangan," tegasnya. Karena itu, mengapa dibentuk MPPI yang dilahirkan 16 tahun lalu menjadi wadah pelaku usaha perbenihan dan perbibitan nasional. **Yul**



Menjawab Krisis Pangan Global dengan Benih

Krisis pangan global menjadi tantangan berat bagi dunia pertanian. Namun di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa diambil pelaku usaha pertanian, termasuk industri benih di tanah air. Benih unggul menjadi kunci mendongkrak produksi pangan.

Dengan kemandirian benih dan bibit, bangsa Indonesia akan mampu menjawab upaya peningkatan produksi pangan. Karena itu gelar Musyawarah Nasional Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) 2022 di Jakarta, Jumat (12/8) menjadi momentum sinergi bagi pelaku usaha perbenihan dan perbibitan untuk menjawab persoalan krisis pangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Prof. Dedy Nursyamsi menilai, ketergantungan terhadap pangan impor harus dikurangi, bahkan harus ditiadakan. "Bicara produksi pangan yang utama adalah faktor benih. Pertanian diawali dari benih dan bibit, bahkan memberikan kontribusi terhadap pendongkrak produktivitas. Artinya, jika menguasai benih dan bibit, maka 70 persen akan menguasai pertanian," ujar Dedy.

Untuk meningkatkan produksi pangan, menurut Dedy, petani harus mendapatkan benih berkualitas dan bermutu, karena benih dan bibit kunci keberhasilan pertanian. "Jadi jangan mimpi pertanian akan berhasil kalau benih masih ala kadarnya. Itu tantangan kita membangun sistem perbenihan dengan baik," ungkapnya.

Dedy melihat, kerjasama

antara breeder dengan penyuluh dan petani juga menjadi kunci keberhasilan. Untuk itu, kerjasama antar breeding dengan penyuluh dan petani mutlak dilakukan. "Keberhasilan perbenihan tidak akan nampak kalau belum terimplementasikan. Semua itu harus dilakukan untuk kemajuan perbenihan, perbibitan di Indonesia," ujarnya.

Bentuk kerjasamanya menurut Dedy, harus dibangun dan tentu terkait dengan kearifan lokal. Sebab, jika pelaku usaha bekerja sendiri-sendiri itu, maka akan berat dan kemungkinan kecil bisa berhasil. Apalagi kini bangsa Indonesia menghadapi tantangan krisis pangan yang cukup berat. "Saya yakin kalau bekerjasama maka akan ada keberhasilan," tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Hortikultura, Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si menekankan pentingnya sinergi harmonis dari lintas stakeholder dalam membangun hulu-hilir industri perbenihan bermutu yang berdaya saing. Dengan demikian dapat mendukung kedaulatan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan.

Dirinya mengakui, ditengah kemajuan inovasi perbenihan hortikultura, Indonesia masih kekurangan benih bawang putih berkualitas. Hal tersebut menyebabkan dalam tiga tahun terakhir ekspor bawang putih terus

meningkat hingga 98,22 persen.

"Kita sudah melakukan program wajib tanam bawang putih, namun petani selalu saja merugi, Karena salah satu faktornya adalah benih yang ditanam adalah benih yang tidak bermutu," ungkapnya.

Retno menambahkan, saat ini ada 8 penangkar benih bawang putih yang telah dibina pemerintah. Varietas unggul bawang putih yang telah dihasilkan adalah Tawangmangu Baru yang memiliki keunggulan umbi yang besar, pertumbuhan yang baik dan batang yang kokoh. "Varietas lain adalah lumbu kuning, lumbu putih dan lumbu hijau," tambahnya.

Dukungan PT dan Pemerintah

Sementara itu Presiden Director PT. Benih Citra Asia, Slamet Sulistiyono menilai, saat ini swasta (produsen benih) hanya berjalan sendiri tanpa dukungan perguruan tinggi maupun pemerintah. Bahkan animo mahasiswa untuk bergerak dibreeding masih kurang. "Perlu adanya dukungan pihak perguruan tinggi, sehingga ada minat yang kuat untuk melanjutkan estafet industri benih terutama dalam pengembangan varietas," katanya.

Untuk itu, Slamet berharap adanya kolaborasi dalam pengembangan benih di dalam

negeri. Kolaborasi tersebut bukan saat hasil akhir yakni benih tersebut sudah dihasilkan lembaga penelitian pemerintah, kemudian industri benih yang memasarkannya.

Namun menurut Slamet, kolaborasi dimulai dari saat pembuatan varietas. Artinya, sudah ada semacam kerjasama penelitian yang hasilnya nanti akan dipasarkan perusahaan benih. "Jadi penelitian sebuah varietas baru harus melihat pasar. Apa yang disukai dan dibutuhkan konsumen. Bukan menghasilkan dulu, kemudian baru meminta konsumen membelinya," katanya.

Slamet menegaskan, bahwa industri benih tidak akan menggali kuburannya sendiri dengan bermain-main pada kualitas. Untuk

itu ia meminta dorongan dan dukungan pemerintah yang bisa membuat iklim usaha yang lancar. Dengan menghadirkan aturan yang mendukung iklim usaha perbenihan

"Kami sebagai pelaku usaha pasti akan berusaha secara maksimal dari hulu sampai hilir mengembangkan inovasi teknologi untuk terus menghasilkan benih bermutu. Itu yang akan

kami lakukan terus menerus dan kolaborasi harus dilakukan," tambahnya.

Sementara itu Managing Director PT. East West Seed Indonesia (EWINDO), Glenn Pardede menyakini dengan membangun industri benih di Indonesia akan membantu petani dan bisa mengurangi impor. Karena itu ia mendukung kerjasama antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam membangun industri perbenihan/perbibitan di tanah air.

Bagi Glenn Pardede, petani adalah yang utama. Bahkan salah satu pesan pendiri Ewindo menurut Glenn adalah bagaimana petani bisa sejahtera. "Jadi apa yang dihasilkan Ewindo merupakan Langkah nyata untuk bisa membantu petani. Itu adalah resep utama dan itu sudah kami jalankan selama 32 tahun di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, sebagai perusahaan yang berfokus kepada keuntungan petani, Ewindo melihat saat ini pengeluaran petani terbesar adalah pada pupuk dan pestisida. Karena itu, perlunya edukasi kepada petani berkaitan dengan *precision farming* sebagai salah satu service yang diberikan kepada petani. **Herman/Yul**





MPPI AWARDS



MPPI LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

1. **Junaidi Sungkono,**
(Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penggerak Organisasi Perbenihan dari PT. Agri Makmur Pertiwi)

MPPI AWARDS

Kategori Bisnis Perbenihan

1. **Slamet Sulistiyono**
(Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dari PT. Benih Citra Asia)
2. **Cipto Sarwadi**
(Produsen Benih Padi dari PP. Kerja)
3. **Glenn Pardede**
(Produsen Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan dari PT. East West Seed Indonesia)
4. **Benediktus Tommy**
(Produsen Benih Kentang dari PT. Clarexindo Makmur Sejahtera)
5. **Cipto Legowo**
(Produsen Benih Tanaman Hortikultura dari PT Tunas Agro Persada)

Kategori Ilmuwan Yang Berkontribusi di Bidang Perbenihan

1. **Mohammad Azrai**
(Breeder Varietas Jagung dari Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, Kementerian Pertanian)
2. **Sobrizal**
(Breeder Varietas Tanaman Padi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional/ BATAN)
3. **Abdul Razak Purba**
(Breeder Benih Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit/PPKS)
4. **Asep Anang**
(Breeder Ternak dari Universitas Padjadjaran /UNPAD)

5. **Muhammad Zanzibar**
(Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
6. **Odang Carman**
(Breeder Bibit Ikan dari Institut Pertanian Bogor/ IPB)

Kategori Birokrat yang Berkontribusi di Bidang Perbenihan

1. **Dedi Nursyamsi**
(Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian)

Kategori Tokoh Organisasi Yang Berkontribusi di Bidang Perbenihan :

1. **H.E. Herman Khaeron**
Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI)
2. **Ricky Gunawan**
Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO)
3. **Bambang Budhianto**
Ikatan Keluarga Perbenihan Indonesia (IKABI)
4. **Mulyono Machmur**
Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI)
5. **Andi Muhammad Syakir**
Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI)
6. **Karen Tambayong**
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
7. **Muhamad Syukur**
Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI)



Tabloid SinarTani

Tabloid SinarTani

SINTA TV

Keluarga Besar Tabloid Sinar Tani

M e n g u c a p k a n

Selamat atas Terpilihnya

Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, MSI

**Sebagai Ketua Umum MPPI
(Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia)
periode 2022-2027**

Selamat menjalankan amanah kembali untuk kemajuan dunia perbenihan dan perbibitan Indonesia menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, MSI

Gandeng Penangkar Sediakan Benih

Berbagai langkah dilakukan Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian dalam penyediaan benih sekaligus menjaga kualitas dan pengawasan benih yang dibagikan ke masyarakat. Mulai dari sertifikasi benih yang beredar, kerjasama dengan penangkar benih hingga pemanfaatan teknologi dalam pengawasan benih.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Dr. Inti Pertiwi Nashwari mengatakan, dalam menyediakan kebutuhan benih selain mendorong Balai Benih untuk mengembangkan benih dengan kekhususannya masing-masing, pihaknya juga bekerjasama intensif dengan para penangkar/produsen benih.

"Penyediaan benih itu pilihannya kita memproduksi atau kita membeli. Yang bisa memproduksi itu balai-balai benih yang ada di seluruh Indonesia. Kalau dulu misal kebutuhan 200 ribu batang, yang 100 ribu kita produksi dan 100 ribu kita beli. Kalau sekarang yang 100 ribu kita kerjasama dengan penangkar yang sudah terseleksi/bersertifikasi," jelasnya.

Inti melihat, banyak keuntungan bekerjasama dengan penangkar. Selain mendapatkan benih berkualitas karena hadir dari penangkar yang sudah tersertifikasi, penghematan anggaran yang cukup besar, juga kedekatan dengan para penangkar semakin terjalin. "Jadi sebelum benih diberikan kepada masyarakat, kita persiapkan T-1nya bekerjasama dengan penangkar dengan sistem swakelola dan penyertaan modal," ujarnya.

Selain ketersediaan, memastikan benih-benih yang beredar di masyarakat bersertifikat menjadi tugas besar Direktorat Perbenihan Hortikultura. Karena itu, berbagai langkah untuk mendorong sertifikasi benih terus dijalankan.

Salah satunya dengan sertifikasi benih mandiri yang bisa dilakukan produsen benih. Bila dahulu produsen benih melakukan sertifikasi melalui Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB), sekarang tidak lagi. Perusahaan benih bisa memberikan sertifikat sendiri pada benihnya tanpa harus melalui BPSB. "Tetapi mereka harus mengikuti sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

Benih Hortikultura (LSSM) untuk mendapatkan Sertifikat Sistem Mutu Mandiri," ungkap Inti.

Saat ini Direktorat Perbenihan Hortikultura sedang menyiapkan sistem pengawasan benih-benih yang dibagikan ke masyarakat. Yaitu dengan melakukan registrasi melalui QR Code yang ada pada setiap benih yang dibagikan.

"Pak Dirjen minta untuk mengevaluasi benih yang sudah dibagikan. Jadi sekarang setiap benih yang dibagikan kita registrasi nanti akan ada QR Code untuk dapat memonitoring benih yang dibagikan," jelasnya.

Benih Bawang Merah

Tingginya harga bawang merah beberapa waktu belakangan menimbulkan kekhawatiran. Selain karena pasokan yang berkurang, kelangkaan benih umbi bawang merah juga menjadi penyebab hal tersebut. Saat ini peningkatan produksi komoditas cabai dan bawang merah menjadi fokus pemerintah karena kedua komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi.

Tingginya harga bawang merah juga menjadi kekhawatiran, karena banyak petani yang lebih menjual umbi bawang merah untuk konsumsi dibandingkan menjadikan benih. Hal tersebut selain akan membuat harga benih umbi bawang merah menjadi tinggi, kelangkaan benih umbi bawang merah akan terjadi. "Selain harga benih yang sudah tinggi, sekarang benih umbi bawang merah juga langka dan sulit didapat," ujarnya.

Untuk menyasati benih umbi bawang merah yang tinggi, Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian ingin mengubah budaya petani bawang merah dari menanam umbi menjadi menanam biji (True Shallot Seed/TSS).

Namun hal tersebut bukan perkara mudah, karena dari pengalaman para petani ketika mereka melakukan penanaman menggunakan biji/TSS sering mengalami kegagalan.



Dr. Inti Pertiwi Nashwari

"Ketika kami tawarkan untuk menggunakan benih TSS ditengah kelangkaan dan mahal nya harga benih umbi bawang merah, petani lebih memilih untuk tidak menanam dan menunggu hingga harga normal kembali," tambahnya.

Untuk menyasati kegagalan penanaman yang dilakukan petani, Inti mencoba dengan *seedling*. Proses pembenihan akan dilakukan pihak lain, baik itu perusahaan benih atau pihak yang bisa menyemai dengan tingkat keberhasilan tinggi.

"Kita akan mencoba untuk proses penanaman tidak dilakukan petani. Jadi tahapan penanaman dilakukan pihak lain yang sudah memiliki kemampuan/kompetensi dengan keberhasilan yang tinggi dan nanti hasil dari penanaman tersebut baru akan diberikan kepada petani untuk ditanam," jelasnya.

Sementara itu guna mengatasi gejala harga cabai, Inti mengungkapkan, pemerintah membagikan benih cabai dalam polybag kepada masyarakat. Cara ini merupakan langkah cepat yang diambil Kementan untuk mengantisipasi kondisi saat ini.

Inti berharap, masyarakat dapat menanam benih cabai ini di pekarangan rumah, sehingga hasilnya nanti dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tahap selanjutnya, Inti sudah berencana untuk membagikan benih cabai kepada masyarakat.

"Setidaknya, jika benih ini ditanam dan hidup di pekarangan rumah warga, ketika berbuah dapat mengurangi pembelian cabai di luar. Mudah-mudahan dapat membantu mengurangi lonjakan harga cabai," katanya. **Dede/Yul**






*Selamat dan Sukses
atas terpilihnya*

Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.

sebagai

Ketua Umum MPPI
(Periode 2022 - 2027)



Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia



PT Carexindo Makmur Sejahtera

POLOWUD GOSARI INDONESIA
HOLDING

PT AGRA INTAN MAKMUR SEJAHTERA



PT Primasid Andalan Utama



PT Advanta Seeds Indonesia



PT. Tunas Agro Persada

ASBENINDO
(Asosiasi Perbenihan Indonesia)

PT. Biogene Plantation



Hikmah Kemerdekaan bagi Petani

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2022 1945 membawa kembali ingatan kita ke masa perjuangan. Tidak hanya sosok para penjuang yang namanya tercantum dalam buku sejarah, tetapi para petani yang namanya tidak pernah tercatat tetapi jasanya paling besar.

Sebelum merdeka, pada saat perjuangan kemerdekaan dan sesudah merdeka peran petani di negeri ini luar biasa. Perdesaan dan pertanian menyediakan logistik dan tempat aman bagi para pejuang. Dan jangan dilupakan, pejuang itu adalah juga petani yang ikut maju ke medan perang, banyak yang gugur sebagai pahlawan walaupun jasadnya tidak ada di makam pahlawan. Bagaimanakah nasib petani kita saat ini?

Hasil kerjanya menghiasi meja makan dan restoran, produknya dinanti tapi petaninya tidak pernah disebut dan diingat orang. Kita semua gelisah ketika bahan makanan berkurang dan harganya naik. Tapi kerja keras yang memproduksinya sering terlupakan. Itulah para petani, pahlawan sejati, kelompok mayoritas di mana terjadi konsen-

trasi kemiskinan yang diam tak pernah protes. Padahal banyak yang berbicara atas nama petani dengan berbagai macam tujuan.

Petani kita berlahan kecil, bahkan buruh tani yang tidak mempunyai lahan pun sering dianggap petani. Mereka butuh dukungan kebijakan yang bisa mengangkat harkat dan derajat mereka sehingga bisa menggapai kesejahteraan. Mereka butuh informasi, bimbingan terus menerus walaupun sudah mencapai tahap kemandirian.

Jumlahnya menurun lambat, nilai produknya terus meningkat karena teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran, tapi kesejahteraan mereka beringsut, tertinggal dibanding pekerja di sektor lain. Salah satunya karena lahan garapannya terus berkurang. Agus Pakpahan menyebutnya guremisasi.

Sesudah merdeka perjuangan



adalah mengisi kemerdekaan petani pun masih menjadi andalan. Pangan adalah tanggungjawab mereka, bahkan dalam keadaan krisis ekonomi pertanian masih melaju tanpa terganggu, sehingga keberadaannya disyukuri sebagai katup pengaman ketika terjadi krisis ekonomi. Kurang apa lagi?

Sementara negara-negara yang menganggap berjaya walaupun tidak mempunyai pertanian dan petani sekarang kelabakan hanya karena ada dua negara sedang berperang. Artinya pangan memang begitu rentan, oleh karena itu pertanian jangan dianggap enteng, pertanian jangan dinomorduakan, apalagi dilupakan. Petani harus tetap jadi orang yang diberdayakan. Bukan berarti harus selalu diberi gratisan tetapi diberi kemudahan sehingga mereka bisa memperoleh dengan mudah apa yang mereka butuhkan

dan dipastikan mendapat keadilan dalam memasarkan hasilnya. Itulah hakekat kemerdekaan buat petani, dan itu semua tergantung kepada kebijakan yang dirakit oleh pemerintah.

Petani memang pahlawan, baik sebelum kemerdekaan, selama perjuangan kemerdekaan, maupun sesudah memperoleh kemerdekaan. Mereka bekerja tanpa memikirkan kemerdekaan mereka sendiri. Oleh karena itu kita yang harus memikirkannya.

Kemerdekaan petani harus tecermin pada kehidupan yang kian sejahtera diukur dari tingkat pendidikan, aset ekonomi, dan tingkat kemandirian. Selamat Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2022. Semoga Bangsa dan Negara semakin maju dan sejahtera dan dalam Lindungan Allah SWT.

Memed Gunawan





PANGAN dan PATRIOTISME BANGSA

Bangsa dunia termasuk Indonesia saat ini tengah diuji. Bagaimana tidak, krisis pangan bukan lagi ancaman, tapi memang benar-benar terjadi. Bukan hanya pengaruh perubahan iklim yang begitu dahsyat, tapi juga karena faktor lain. Pandemi Covid-19 belum usai, perang Rusia dan Ukraina memperparah krisis pangan dan berdampak buruk negara lain.

Kondisi ini menuntut semua negara akhirnya harus menjaga pangannya masing-masing. Ekspor pangan pun dibatasi, bahkan distop. Bagi negara yang selama ini pasokan pangannya mengandalkan dari impor, terpaksa harus mengemis untuk mendapatkannya.

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan hasil survei cadangan beras nasional (SCBN) 2022 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghitung ketersediaan cadangan beras di tingkat rumah tangga, penggilingan, pedagang beras, Bulog, horeka, industri dan pengolahan, stok beras cukup aman.

Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Kemudian pada 30 April 2022 meningkat 10,15 juta ton dan stok pada Juni 2022 menjadi 9,71 juta ton. Pada Juni sebagian besar berada di institusi rumah tangga yang mencapai 6,6 juta ton, kemudian di pedagang 1,04 juta ton, BULOG 1,1 juta ton, penggilingan 0,69 juta ton dan di

Horeka maupun industri sebesar 0,28 juta ton.

Artinya, secara umum, rata-rata stok beras di seluruh institusi cenderung mengalami peningkatan pada periode 30 April 2022 dibandingkan periode 31 Maret 2022. "Stok beras kita mencukupi dan akan terus bertambah seiring dengan adanya panen tiap bulan hingga akhir Desember 2022. Indonesia Swasembada Beras," katanya Deputy Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah.

Pangan Lokal

Krisis pangan yang terjadi saat ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Bahkan ujian bagi patriotisme kebangsaan. Meski BPS mencatat stok beras dalam negeri surplus di tengah bangsa dunia kesulitan pangan, Rektor IPB University, Prof. Arif Satria mengatakan, mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi ancaman yang sama, yaitu krisis pangan dan energi, perhitungan ini (BPS) menjadi sangat penting.

"Agenda penting kita kini adalah bagaimana terus mempertahankan

dan harus bisa meningkatkan ketersediaan pangan, sehingga krisis pangan yang sudah didepan mata bisa kita antisipasi," katanya.

Ke depan, Arif berharap, pengelolaan pangan dapat difokuskan pada pengembangan substitusi pangan lokal sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengganti panganan utama. Namun dalam pengelolaan pangan lokal tersebut harus mengedepankan aspek kualitas.

"Karena beras sebagai komoditas utama dan menjadi suatu hal yang penting. Pertama, saat ini masalahnya diversifikasi pangan itu lebih kepada terigu yang mayoritas impor. Kedua, kita harus fokus pada produksi beras berkualitas bagus dan melakukan pendampingan," katanya.

Patriotisme bangsa juga kini dituntut untuk melepas ketergantungan dari pangan impor, khususnya gandum dan terigu. Faktanya, merujuk data BPS, total impor gandum Indonesia 2021 sebesar 11,6 juta ton yang dan berasal dari Australia, Ukraina, Kanada, Amerika Serikat dan lainnya. Banyak negara yang mengonsumsi gandum, baik di Asia, Afrika, Eropa, kini berada di posisi yang sangat sulit. Selain harganya mahal, barangnya juga sulit.

Karena itu, Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi mendukung upaya menggerakkan konsumsi pangan lokal dan produk olahannya dari singkong, sorgum hingga sagu sebagai pengganti gandum.

"Saatnya kita gaungkan konsumsi pangan lokal, jangan bergantung pada gandum," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Gandhi, membangkitkan pangan lokal untuk menggantikan gandum adalah langkah yang tepat. Bahkan ia menilai, kondisi global saat ini menjadi pelajaran bahwa ketergantungan pangan impor adalah tidak baik. Kondisi ini harusnya menyadarkan semua pihak untuk mengonsumsi pangan lokal. "Saatnya kita lebih sadar untuk mencintai produk dalam negeri. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mandiri pangannya," ucapnya.

Sementara dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua orang dalam memperkuat produksi pangan. Kemampuan Indonesia pada pengelolaan pertanian menjadi modal dasar dalam mengantisipasi krisis global.

"Kita jangan bilang merdeka kalau kita masih tergantung impor. Kemerdekaan sesungguhnya baru bisa dipertahankan apabila bangsa Indonesia bebas dari ketergantungan impor," tegasnya. Saat ini menurut SYL, semua negara di dunia dalam kondisi yang tidak baik karena inflasinya naik tinggi. Amerika Serikat sudah 8,6% dan Turki 73,5%. Sedangkan Indonesia masih terjaga di angka 3,55%.

Untuk menekan ketergantungan impor menurut SYL, harus bisa dibuktikan dengan peningkatan produksi tanaman pangan dan juga produksi panganan lokal. Pemerintah pun mendorong pengembangan komoditas substitusi tepung terigu seperti sorgum sebagai pengganti gandum, juga meningkatkan penggunaan tepung dari singkong, sagu, jagung lokal dan lainnya.

"Itulah kenapa kita tanam singkong, sagu dan sorgum. Semua agar kita merdeka dan bangga dengan buatan kita. Sagu, singkong dan sorgum itu kan kekuatan bangsa yang selama ini kita lupakan. Jadi harus kita kembalikan untuk kejayaan," kata mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Pertanian sejauh ini telah membuktikan sebagai bantalannya ekonomi negara. Mencintai bangsa Indonesia, haruslah mencintai pertanian. **Yul**



Pemenuhan Pangan dari Lahan Terbatas Perkotaan

Oleh: Drs. Zulkifli, M.M *)

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan karena adanya urbanisasi memerlukan perhatian dan pengelolaan secara komprehensif karena berdampak pada berbagai aspek pembangunan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pertanian perkotaan (urban farming). Pertanian perkotaan diharapkan dapat secara bertahap membantu mewujudkan ketahanan pangan di perkotaan.

Namun disisi lain, rumah-rumah di perkotaan tidak mempunyai halaman rumah ataupun pekarangan yang luas. Lebar terkecil pekarangan rumah di Indonesia hanya 0.75 m, sedangkan lebar pekarangan terbesar hanya 3 meter. Halaman sempit bukan kendala untuk melakukan usaha pertanian, sebab budidaya tanaman bisa dilakukan di mana saja asalkan ada cahaya dan sirkulasi udara yang optimal. Bahkan di rumah yang tidak punya halaman sama sekali, misalnya di rumah susun, kegiatan pertanian bisa dilakukan.

Pada prinsipnya sistem pertanian kota (*Urban Agriculture*) dijalankan dengan pengembangan teknologi pertanian yang hemat lahan, karena ketersediaan lahan yang sempit. Pemanfaatan lahan pekarangan yang berkesinambungan adalah usaha pekarangan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus.

Praktik di berbagai negara dapat dijadikan contoh baik bagi penerapan pertanian perkotaan di Indonesia. Pertanian perkotaan telah muncul di beberapa kota di Amerika Serikat seperti Detroit, New York, dan Philadelphia. Saat ini, fokus pengembangan pertanian perkotaan adalah untuk meningkatkan keamanan pangan maupun akses untuk memperoleh makanan yang sehat. Hal ini dikarenakan banyak kota yang memiliki area yang termasuk 'langka bahan pangan' dimana penyebabnya bukan disebabkan oleh minimnya ketersediaan pangan, namun karena lebih banyak pangan olahan yang dihasilkan dibandingkan pangan segar dan berkualitas.

Di suatu lahan pertanian yang terletak di Wisconsin, pertanian perkotaan yang intensif dan membudidayakan tanaman yang memiliki nilai tinggi menunjukkan hasil yang sangat baik

yaitu sekitar \$100.000 per hektar. Implementasi paling mengagumkan dari pertanian perkotaan dapat dilihat di Havana, Kuba. Havana mengalami kesulitan yang luar biasa sejak kejatuhan Uni Soviet dan tidak mampu mengimpor beberapa komoditas penting bagi rakyatnya seperti bahan bakar, mesin-mesin, dan pangan. Sejak tahun 1997 – 2003 terdapat peningkatan pertanian perkotaan sebesar 38% per tahun.

Beberapa kota di Indonesia sudah mulai menerapkan dan mengembangkan pertanian perkotaan namun masih banyak juga kota-kota di Indonesia yang masih mengandalkan kebutuhan pangan dari daerah lain. Contohnya Kelurahan Made di Surabaya telah sukses melaksanakan program pertanian perkotaan dengan baik, yang digerakkan oleh gabungan kelompok tani Made Bersinar yang beranggotakan 563 orang. Kelurahan Made telah sukses menurunkan angka kemiskinan dan telah memiliki komoditas perdagangan dari hasil pertaniannya. Hasil pemasaran komoditas ini telah mampu meningkatkan finansial masyarakatnya.

Praktik pertanian perkotaan dapat dimulai dari rumah sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal (pengetahuan lokal dan komoditi pangan lokal) dengan sentuhan teknologi sederhana spesifik lokasi melalui model KRPL.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disarankan, yaitu (1) Pertanian perkotaan menggunakan aplikasi teknologi sederhana dan tepat guna yang mudah dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, (2) Manfaatkan kembali limbah organik kota sebagai sumber hara dan nutrisi bagi tanaman. Kotoran-kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Sehingga limbah organik dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, (3) Praktik pertanian perkotaan diterapkan dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan bersih, (4) Sangat diperlukan dukungan pemerintah terhadap pelaku pertanian perkotaan berupa insentif, kebijakan maupun kepastian hukum.

(Mahasiswa Doktoral Program Studi Pembangunan Universitas Hasanuddin)



Oleh: Memed Gunawan

Pelayanan bagi Petani

Mengikuti Webinar tanggal 10 Agustus 2022, pengalaman yang paling pantas dicatat adalah tingginya antusiasme peserta mengikuti pemaparan dan diskusi tentang hama, dan banyaknya petani, penyuluh dan bahkan pengusaha anggota Kadin yang meminta informasi dan penjelasan tentang masalah teknis produksi dan kondisi pertanian. Bahkan pertanyaan lainnya terpaksa tidak sempat dibahas karena keterbatasan waktu.

Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan kali ini saja karena terjadi juga pada beberapa Webinar sebelumnya. Intinya, banyak masalah yang ingin diketahui pelaku usaha pertanian di lapangan yang perlu didukung oleh pelayanan informasi, tetapi masih mengalami berbagai keterbatasan. Sebagai contoh, kita prihatin karena jumlah pengamat hama sangat terbatas sehingga satu orang pengamat hama harus menangani 2-3 kecamatan. Lalu anggaran penyuluhan demikian terbatas sehingga tidak memadai untuk operasional penyuluhan di lapangan. Jadi tambahan tenaga penyuluh tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Ke mana pelaku usaha meminta penjelasan tentang masalah pertanian? Era digital sudah tiba, teknologi informasi sudah jauh di depan tetapi akses digital di pedesaan masih mempunyai banyak terkendala infrastruktur dan literasi digital dan pemanfaatan untuk tujuan produktif. Petani tetap harus dibantu dengan penyediaan informasi yang mereka perlukan. Itulah makna pentingnya penyuluhan.

Kunjungan penyuluh ke lapang dan tatap muka dengan petani membuka kesempatan bagi petani untuk bertanya. Institusi Pelayanan Pertanian dari unit terkecil sampai dengan pusat adalah lembaga pelayanan yang memberikan informasi yang diperlukan petani. Di sini semua informasi tentang pertanian dari hal teknis, peluang dan kebijakan akan mereka peroleh.

Tabloid Sinar Tani yang berkiprah sejak tahun 1970 menjadi andalan dalam menyalurkan informasi kepada penyuluh sebagai bekal dalam penyuluhan. Penyebarannya mencapai pelosok nusantara dan menjadi saudara kembar penyuluh pertanian tidak hanya karena interaksi informasi yang kuat, tetapi juga karena lahir bersamaan pada tahun 1970. Selain itu penyuluh mendapat pelatihan rutin dan informasi dari Balai Informasi Pertanian (BIP).

Jadi sejak istilah pertanian hanya disebut sederhana "Bercocok tanam" sampai disebut "Agribisnis", informasi teknologi, peluang usaha dan kebijakan pertanian tetap diperlukan. Riset, teknologi dan penyuluhan menjadi tulang punggung perkembangan pertanian.

Ketika petani di pedesaan sangat dekat berinteraksi dengan penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian merasakan keberadaannya dibutuhkan petani, terjalinlah interaksi petani-penyuluh yang diharapkan. Amunisi penyuluh, berupa pengetahuan yang terus berkembang harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan dukungan informasi.

Kajian ringkas pada tahun 2019 dan wawancara serta pengamatan dari berbagai pertemuan menunjukkan bahwa Tabloid Sinar Tani yang sudah berusia 52 tahun itu sangat diperlukan penyuluh. Semoga sinergi yang baik ini terus berlanjut dan meningkat. Peringatan Hari Kemerdekaan ke 77, 17 Agustus 2022 menjadi semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi petani, pahlawan pembangunan yang terus memberi arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.



Pemerintah Permudah Pendaftaran Pestisida Alami

Back to nature. Semboyan ini terus pemerintah gaungkan dalam dunia pertanian. Karena itu, penggunaan sarana produksi, baik pupuk dan pestisida alami menjadi prioritas utama. Untuk itulah, pendaftarannya kian dipermudah.

Koordinator Kelompok Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Lolitha Tasik Taparan mengatakan, penggunaan pestisida harus dikelola dengan kehati-hatian, karena bisa berdampak pada lingkungan. Karena itu, pestisida yang diedarkan di Indonesia harus yang terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian.

Sesuai kebijakan nasional, pengaturan pestisida di Indonesia harus lintas sektor. Dari mulai pengelolaan tanaman, peternakan, perikanan, kehutanan, penyimpanan hasil pertanian, pemukiman dan rumah tangga, karantina dan pra-pengapalan). "Kebijakan ini mengacu pada PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas

Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida," katanya saat webinar Merdeka Petani dari Musuh Tanaman yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, Rabu (10/8).

Lolitha mengatakan, klasifikasi pestisida berdasarkan bahan aktif terbagi dua. Pertama, pestisida sintetik yakni pestisida yang berbahan aktif satu atau lebih bahan aktif senyawa sintetik. Kedua, pestisida alami yakni, pestisida biologi, pestisida metabolit dan pestisida mineral.

"Pestisida biologi bahan aktifnya dari mikroorganisme atau virus. Sedangkan pestisida metabolit berasal dari bahan aktif senyawa makhluk hidup. Sementara pestisida mineral berasal dari mineral alami," tuturnya.

Dengan makin berkembang-

nya penggunaan pestisida nabati, Lolitha mengatakan, pemerintah mendorong dan memberikan kemudahan dalam pendaftaran pestisida alami. Harapannya, agar animo pelaku usaha mendaftarkan pestisida alami semakin meningkat.

"Terdaptarnya pestisida, akan menjamin mutu dan efektifitas pestisida yang diedarkan, melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida," tuturnya.

Tujuan lain pendaftaran pestisida menurut Lolitha, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida. Selain itu, memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.

Pendaftaran Pestisida

Dalam pendaftaran pestisida, ada tiga jenis izin. Pertama, izin percobaan. izin ini hanya berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 1 tahun. Namun, pestisida belum bisa diperjualbelikan. "Untuk pemohon yang sudah mendapatkan izin percobaan diwajibkan untuk melakukan pengujian, baik mutu, efikasi dan toksisitas," katanya.

Dengan pengujian tersebut, pemerintah bisa mengetahui apakah pestisida tersebut sesuai dengan rencana. Proses pengujian tersebut berlangsung paling lama tiga tahun. Namun dapat diperpanjang dua kali dengan waktu masing-masing dua tahun.

Kedua, izin tetap yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Pestisida yang mendapat izin tetap sudah dapat

diperjualbelikan. Ketiga, izin sementara yang berlaku selama 1 tahun. "Izin sementara ini hanya berlaku saat keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) di wilayah tertentu," tegasnya.

Lolitha mengatakan, semua proses pendaftaran pestisida tersebut sudah melalui online sejak tahun 2014. Sejak 2021, dengan kebijakan perizinan berbasis resiko, semua perizinan melalui OSS di Komisi Perizinan Nasional (KPN). "Jadi pemohon setelah mendapatkan NIB melalui OSS selanjutnya masuk ke sistem pendaftaran pestisida. Izinnya nanti melalui Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP)," ujarnya.

Di PVTTP lanjut Lolitha, akan dilakukan verifikasi dari sisi administrasi. Setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya izin tersebut masuk ke Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk diverifikasi bagian teknis. Dari hasil verifikasi teknis, tim teknis akan mengevaluasi tiap bulan untuk memeriksa dokumen, baik sisi komposisi formulasi, bahan teknis, penggunaan yang didaftarkan, bahkan sampai ke label.

"Pemohon harus memberikan drafnya ke Ditjen PSP dan diperiksa setiap bulan satu kali oleh tim teknis," tambahnya. Setelah dievaluasi tim teknis Komisi Pupuk dan Pestisida dan memenuhi persyaratan tidak ada bahan aktif yang dilarang, selanjutnya diterbitkan SK izin percobaan. "Untuk mendapatkan SK izin lengkap tersebut, pemohon harus mencantumkan hasil pengujian," katanya.

Sedangkan jika ingin mendapatkan izin tetap, Lolitha mengatakan, saat mengajukan izin, pemohon wajib mencantumkan hasil uji mutu, uji toksisitas dan efikasi. Jika kebijakan sebelumnya yang melaporkan pemohon, maka kini pihak yang menyampaikan laporan adalah lembaga uji secara online melalui OSS untuk dilakukan verifikasi.

Menurut Lolitha, prosesnya sama, setelah pengajuan online akan masuk ke PVTTP, kemudian ke Komisi Pestisida, lalu dievaluasi tim teknis pestisida setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya, Komisi Pestisida melakukan rapat untuk diusulkan ke Kementerian Pertanian, apakah diterima, ditolak atau ditunda.

"Setiap tiga bulan sekali, Komisi Pestisida akan melakukan evaluasi terhadap perizinan pestisida, baik yang akan mendapatkan izin tetap, atau tetap ulang atau ekspor dan perluasan penggunaan," katanya. Dari hasil rapat pleno Komisi Pestisida inilah yang akan diajukan untuk mendapatkan SK Menteri Pertanian. **SW/Yul/Ditjen PSP**

KLASIFIKASI PESTISIDA

Berdasarkan Peraturan Menteri 43 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Pestisida terbagi atas:

No.	Kategori	Sub-kategori
1	Berdasarkan bahan aktif pestisida	<ul style="list-style-type: none"> Pestisida Sintetik, pestisida yang bahan aktifnya senyawa sintetik Pestisida Alami <ul style="list-style-type: none"> Pestisida Biologi Pestisida Metabolit Pestisida Mineral
2	Berdasarkan bentuk	<ul style="list-style-type: none"> Pestisida Cair Pestisida Padat
3	Berdasarkan fungsi penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> Pestisida Tanaman Pestisida Hama Pengganggu

info PSP

Bersiap dengan Tata Kelola PUPUK BARU

Keluarnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 10 Tahun 2022 menjadi pinjakan terbaru untuk tata kelola pupuk subsidi. Selain jenis pupuk yang disubsidi hanya urea dan NPK, komoditas yang mendapat alokasi pupuk subsidi pun berkurang.

Bagaimana daerah mulai bersiap menghadapi perubahan kebijakan baru tersebut. Seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yang langsung melakukan koordinasi terkait pendataan pada usulan yang masuk ke dalam sistem elektronik-RDKK (eRDKK).

"Tata kelola pupuk subsidi dimulai dari perencanaan dan proses perumusannya yang dilakukan di unit terkecil yakni kelompok tani," ungkap Koordinator BPP Kecamatan Wagir, Ferly Tambunan. Karenanya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wagir langsung berkoordinasi dengan distributor, kios/pengecer dan perwakilan kelompok tani untuk membahas adanya kebijakan tersebut. "Kami berharap nantinya ada kesepahaman yang baik untuk petani," katanya.

Ferly mengatakan, agenda koordinasi ini dilaksanakan untuk membantu dan memudahkan petani dalam menyampaikan apa yang petani perlukan. Contohnya untuk kebutuhan pupuk dan penyaluran pupuk ke petani yang harus tepat sasaran. "Jangan sampai petani tidak mendapatkan pupuk subsidi," tambahnya.

Dalam pertemuan ini Ferly mengungkapkan, juga disampaikan tentang persiapan penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) pupuk bersubsidi di tahun 2023. Diakui, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam pendataan petani penerima. Misalnya, syarat pengajuannya menggunakan fotocopy Kartu

Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan SPPT kepemilikan lahan.

Data-data tersebut perlu dilampirkan, karena luas lahan yang masih dapat diajukan maksimal 2 ha dengan nama yang terdaftar sesuai NIK yang ada dalam KTP. Bukan hanya itu lanjut Ferly, nama yang terdaftar juga harus satu nama yang ada dalam KK.

"Jadi perbedaannya kalau dulu masih dapat dalam KK ada 2 nama. Sedangkan data lainnya adalah pencantuman titik koordinat atau lokasi GPS lahan yang sesuai dengan SPPT dan komoditas yang dibudidayakan," tuturnya.

Dalam menyikapi adanya kebijakan ini beberapa langkah yang diambil BPP Kecamatan Wagir adalah melalui penyuluh wilayah masing-masing untuk dapat berkoordinasi dengan desa atau dusun dan kelompok tani. Diharapkan dengan koordinasi yang baik tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran dan penerimaan pupuk subsidi.

Kemudian penyuluh melakukan sinkronisasi data petani yang diajukan dalam SIMLUHTAN, sehingga hak petani benar-benar terjamin untuk mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi dapat menggunakan pupuk non subsidi yang tersedia di kios atau pengecer yang ada di wilayah.

"Semoga kedepannya petani tidak akan ketergantungan dalam penggunaan bahan kimia dalam pupuk bersubsidi ini dan lebih dapat memanfaatkan penggunaan pupuk organik yang aman dan ramah lingkungan," tuturnya.

Tata Kelola Lebih Baik

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak semua pihak untuk merapatkan barisan menghadapi harga pupuk dunia yang semakin naik. Sebagai antisipasi, Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentan No 10 Tahun 2022 yang mengatur tata cara alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

"Hal tersebut sangat penting dan strategis, karena menentukan kondisi rakyat bangsa dan negara yang akan datang. Pertanian hebat bangsa hebat, pertanian kokoh bangsa kokoh. Karena, kebutuhan tersier bisa ditunda, tapi makanan, pertanian tidak boleh sedikitpun tertunda," tutur SYL.

Pemerintah berharap Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ini tata kelola pupuk bersubsidi dapat lebih baik, serta dapat mengantisipasi kondisi krisis pangan global yang terjadi. Salah satu poin Permentan itu yakni membatasi jenis pupuk subsidi, yang difokuskan menjadi hanya dua jenis pupuk, yakni NPK dan Urea.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Dwijendra, Gede Sedana menilai, penggunaan pupuk Urea dan NPK sangat bermanfaat sebagai pupuk dasar dalam peningkatan produktivitas tanaman melalui pertumbuhan vegetatif dan generatif. "Para petani telah terbiasa menggunakan kedua jenis pupuk tersebut dalam jumlah yang cukup tinggi sesuai dengan kebutuhan tanamannya sehingga masih sangat layak untuk disubsidi," katanya di Bali, Jumat (5/8).

Karenanya, lanjut Ketua DPD HKTI Bali ini, tepat jika pupuk NPK dan

Urea masih disubsidi pemerintah pada sembilan komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi. "Sebenarnya kebijakan pemerintah ini memiliki manfaat kepada petani agar bijak dalam pengaplikasian pupuknya, selain mendorong petani agar menggunakan pupuk organik yang bisa diproduksi secara lokal," jelas Gede.

Selain itu, kata Gede Sedana, penyaluran pupuk subsidi memberikan manfaat ekonomis bagi petani, terutama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan biaya produksi pertanian. Biaya produksi dapat ditekan, sehingga petani akan memperoleh keuntungan berproduksi dengan asumsi harga produk tetap wajar. "Kondisi sangat bermanfaat bagi sektor pertanian karena para petani tetap bergairah untuk mengelola usaha taninya secara berkesinambungan," ujarnya.

Kendati demikian, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) Bali ini berharap penyaluran pupuk subsidi kepada petani harus tepat sasaran dan datang tepat saat musim tanam petani berlangsung. Untuk itu, penyaluran pupuk subsidi memerlukan pendataan yang faktual dari petani atau kelompok petani melalui verifikasi. Hal ini guna menghindarkan penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran.

"Penyaluran pupuk bersubsidi perlu memperhatikan aspek waktu yang tepat. Dalam artian tersedia di tempat sesuai dengan kebutuhan tanaman di lahan usaha taninya," tegas Gede.

Ferly/Yul/Ditjen PSP



Bumi Serambi Mekkah Terapkan Asuransi Pertanian Syariah

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada petani dan peternak adalah meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Di Bumi Serambi Mekkah, Aceh, Pemerintah Daerahnya kini menggagas Asuransi Pertanian Syariah.

Merespon amanat Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan inisiatif perumusan Peraturan Gubernur (PERGUB) Aceh tentang Asuransi Pertanian Syariah. Perumusan PERGUB ini, menjadi landasan dan terobosan agar pelaku usaha tani maupun ternak di Aceh tetap mendapatkan fasilitas perlindungan secara syariah.

Tim perumus PERGUB Asuransi Pertanian Syariah ini terdiri dari kolaborasi antara dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Pembahasan yang sudah memasuki fase finalisasi draft PERGUB ini, berlangsung sejak tanggal 27-28 Juli 2022 di Takengon Kabupaten Aceh Tengah.

Tim Perumus yang diketuai Dr. Rahmat Fadhil, M.Sc menyatakan, perumusan PERGUB Asuransi Pertanian Syariah ini, secara berkelanjutan sudah melalui berbagai tahapan pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, pelaku industri keuangan Syariah, petani, peternak, penyuluh dan sejumlah praktisi maupun akademisi.

"Perumusan PERGUB Asuransi Pertanian Syariah ini juga mendapatkan dukungan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) dari LPDP Kementerian Keuangan," kata Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala ini.

Program Asuransi Pertanian secara konvensional sebenarnya sudah diimplementasikan melalui fasilitas AUTP dan AUTS/K sejak tahun 2015. Fasilitas kedua asuransi itu diberikan kepada petani dan peternak di Indonesia sebagaimana Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dengan berlakunya Qanun 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), program pemerintah melalui lembaga keuangan di Aceh harus mendapatkan penyesuaian untuk dapat dilaksanakan dengan pola dan sistem keuangan Syariah. Kehadiran PERGUB Asuransi Pertanian Syariah akan memberikan lan-

dasan dan kepastian bagi petani maupun peternak Aceh agar tetap memperoleh fasilitas perlindungan usaha tani dan ternak.

Pembahasan diikuti para stakeholder dari Bappeda Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Peternakan Aceh, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh. Perumusan finalisasi draft Pergub Asuransi Pertanian Syariah ini perlu segera diselesaikan. Pasalnya, risiko usaha tani dan ternak yang terus meningkat tinggi di kabupaten/kota di Provinsi Aceh, seperti penyakit ternak, perubahan iklim, dan serangan hama penyakit tanaman.

Berpihak ke Petani/Peternak

Produk Asuransi Pertanian Syariah ini dijelaskan tim perumus PERGUB Asuransi Pertanian Syariah, Dr. Muhammad Yasir Yusuf, merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk menghadirkan produk keuangan syariah yang berpihak bagi petani dan peternak Aceh. Selain itu, memberikan akses pembiayaan pada sektor pertanian sebagaimana amanat Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

"Nantinya, pihak Perbankan Syariah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan fasilitas pembiayaan syariah pada sektor pertanian karena telah adanya mitigasi risiko usaha para petani dan peternak di Aceh," kata Yasir.

Sebelum diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hasil perumusan draft PERGUB Asuransi Pertanian Syariah ini akan dikaji dulu oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh. Dengan disahkannya PERGUB ini, Provinsi Aceh telah memiliki landasan formil yang kuat untuk segera menjalankan program Asuransi Pertanian Syariah kepada petani dan peternak.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Fakhurrazi mengatakan, memang ada permintaan masyarakat agar di Aceh agar dihadirkan perusahaan asuransi pertanian syariah atau AUTP Syariah. Nantinya perusahaan inilah yang bermitra dengan Pemda Aceh dalam kegiatan asuransi pertanian.

Menurutnya, saat ini antusias petani Aceh untuk bisa ikut program asuransi pertanian sangat tinggi. Bahkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Tingginya minat petani, karena adanya subsidi pembayaran premi yang nilainya lumayan besar.

Tahun ini yang mendaftar mencapai 16 kabupaten, padahal alokasi dana yang tersedia hanya bisa mengcover tiga kabupaten. Karena itu, pihaknya telah melakukan revisi agar program asuransi pertanian benar-benar bisa membantu petani yang memang membutuhkan. "Dengan keterbatasan anggaran, kami tidak bisa memenuhi keseluruhan permintaan petani. Untuk tahun 2022 ada permintaan asuransi pertanian seluas 12 ribu ha," katanya.

Pada tahun 2021, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bekerjasama dengan Jasindo Sumut dalam program AUTP bagi petani Aceh. Sejauh ini dukungan APBD dari target luasan 5.000 ha dan terealisasi seluas 4.800 ha. "Saat ini kami masih terus berkomunikasi intensif dengan Jasindo Sumut. Untuk tahun 2022 kami menyiapkan anggaran untuk luasan 4.000 ha," kata Fakhurrazi.

Sementara itu Direktur Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Indah Megahwati mengatakan, pemerintah terus meningkatkan kesadaran ber-asuransi melalui sosialisasi program asuransi pertanian secara lebih masif. "Memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan AUTP," katanya.

Pertama, kesadaran ber-asuransi kelompok tani. Misalnya, petani yang sudah berulang kali menjadi peserta AUTP, tapi tidak pernah klaim. Akibatnya, petani enggan untuk mengikuti kembali program AUTP.

"Kadang ada petani yang merasa lahannya aman dari risiko, sehingga enggan menjadi peserta asuransi. Kemauan petani untuk membayar premi swadaya 20 persen juga masih rendah," kata Indah.

Data Jasindo untuk tahun 2020, peserta AUTP 1.367.678 petani dengan luas lahan 1.000.001,38 ha dan nilai klaim Rp 103,7 miliar. Adapun Tahun 2021, jumlah peserta AUTP 588.664 petani, luas lahan 374.088,22 ha dan nilai klaim Rp 53,9 miliar.

Abda/Yul/Ditjen PSP





MEMAJUKAN INDUSTRI PUPUK DAN PESTISIDA NASIONAL



TAVIP KUPIYOTOMO
SEKRETARIS JENDERAL



SUDRADJAT YUSUF
KETUA UMUM

Seminar Nasional Pengaruh
Krisis Energi Dunia Terhadap
Pasokan Pupuk dan Pestisida
 Pelayanan Konsultasi
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida
 Monitoring Penertarikan Pupuk
dan Pestisida Melalui ISU UPMU
 Fertilizer Quality Control
Pestisida dan Pupuk

Tentang

Asosiasi Crop Care Indonesia didirikan tahun 2000 merupakan asosiasi nirlaba bidang agrokimia beranggotakan perusahaan pupuk dan pestisida yang sebagian besar merupakan perusahaan dalam negeri, dimana 50% di antaranya memiliki pabrik formulasi sendiri.

KUNJUNGI ASOSIASI CROP CARE INDONESIA

- Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura, Jl. AUP No 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- asosiasicropcareindonesia@gmail.com
- Asosiasi Crop Care Indonesia
- @asosiasicropcareindonesia
- www.cropcare.or.id

Anggota Asosiasi Crop Care Indonesia :



Branding Awareness Petani Milenial Subang Lewat Open Day YESS Polbangtan Bogor

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS) di Jawa Barat bersinergi dengan SMK Negeri 1 Pusakanagara Kabupaten Subang menggelar pameran pertanian melalui kegiatan **Open Day**.

Pameran pertanian ini dibuka untuk umum dengan tujuan untuk branding awareness kepada masyarakat khususnya para remaja untuk memperkenalkan dunia pertanian sejak dini. Selain itu, kegiatan yang memamerkan seluruh produk hasil pertanian dan olahannya ini untuk mengenalkan masyarakat sekitar tentang Program YESS.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi sekaligus membuka acara tersebut. Dalam kesempatan itu Wakil Bupati menyampaikan bahwa potensi pertanian dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Subang sangat besar sehingga kehadiran program YESS di Kabupaten Subang disambut dengan baik. "Dengan adanya kerjasama



di bidang pendidikan dan pertanian akan mempercepat pertumbuhan wirausahawan pertanian di Kabupaten Subang", ujarnya.

Ditambahkannya, SMK Negeri 1 Pusakanagara akan bersinergi dengan Program YESS yaitu berperan aktif mengarahkan siswa dan siswinya untuk menjadi wirausahawan muda di bidang pertanian. Hal ini tentunya akan berdampak baik untuk menguatkan sinergi dunia pertanian dengan dunia usaha. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan sebagai media sosialisasi program-program dari Kementerian Pertanian.

Hadir pula Direktur Polbangtan Bogor, Detia Tri Yunandar yang menyatakan bahwa kegiatan open day merupakan kolaborasi

antara Polbangtan Bogor dibawah Kementerian Pertanian dengan International Fund Agricultural Development (IFAD) melalui program YESS. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan minat siswa untuk bekerja di bidang pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan regenerasi Petani Milenial.

Dalam kesempatan yang sama dilakukan penyerahan secara simbolis program Hibah Kompetitif kepada 25 orang penerima HK di tahun 2022, serta pelepasan program magang bersertifikat YESS PPIU Jabar tahun 2022.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang meyakini kaum milenial yang inovatif dan memiliki gagasan yang kreatif

mampu mengawal pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern. "Pertanian memiliki potensi yang luar biasa. Potensi yang bisa menghasilkan. Kita berharap generasi muda bisa menggarap sektor ini. Karena, pertanian seperti merpati yang tidak pernah ingkar janji," katanya.

Arahan Mentan SYL ini juga diimplementasikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menuturkan bahwa sekarang ini dibutuhkan sekelompok anak muda yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.

"Sudah saatnya pertanian dikelola oleh generasi milenial yang menggunakan kreativitas dan inovasinya sehingga pertanian kedepan menjadi pertanian modern yang tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya tetapi juga berorientasi ekspor. Saat ini kita telah memiliki banyak petani milenial sekaligus entrepreneur di bidang pertanian," paparnya.

YESS PPIU Jabar/Ardianinda Wisda/Polbangtan Bogor

FMC | An Agricultural Sciences Company

powered by

RYNAXYPYR®

#SelaluPrevathon®



1 Gunakan Prevathon®

2 Kali semprot diumur 21 & 28 HST

3 ml/l air
Minimal volume air 250 l/ha